



ANALISIS MAKRO EKONOMI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2016**

KATA PENGANTAR

Buku ini merupakan laporan akhir dari kegiatan “**Analisis Makro Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta**” tahun anggaran 2016.

Laporan ini menyajikan analisis deskriptif yang meliputi analisis Kondisi Ekonomi DIY 2011-2015, Proyeksi Indikator Ekondisi konomi DIY 2016-2020, Perubahan Asumsi Ekonomi Makro DIY tahun 2014/2015 dan tahun berjalan 2016/2017; dan skenario Pencapaian Target Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan RPJMD DIY 2012-2017.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), dan pihak terkait sebagai input dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah terkait pembangunan perekonomian DIY secara komprehensif.

Terima Kasih

Yogyakarta, 2016

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	ii
KATA SAMBUTAN	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Maksud	I-2
1.3 Tujuan	I-2
1.4 Sasaran	I-2
1.5 Manfaat	I-2
1.6 Lokasi Kegiatan	I-2
1.7 Sumber Pendanaan	I-2
1.8 Lingkup Pekerjaan	I-2
1.9 Keluaran	I-3
BAB II LANDASAN TEORI	II-1
2.1 Konsep dan Definisi PDRB.....	II-1
2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	II-5
2.3 Inflasi	II-6
2.4 ICOR.....	II-9
2.5 Ketenagakerjaan.....	II-15
2.6 Kemiskinan	II-20
2.7 Indeks Williamson	II-21

Halaman

2.8	Indeks Gini	II-21
BAB III	METODOLOGI	III-1
3.1	Menganalisis Kondisi Ekonomi DIY 2011-2015	III-1
3.2	Proyeksi Indikator Ekonomi DIY 2016-2020	III-1
3.3	Menyusun Perubahan Asumsi Ekonomi Makro Tahun 2014/2015 dan Tahun 2015/2016	III-1
3.4	Menyusun Skema Pencapaian Target Pertumbuhan Ekonomi	III-2
BAB IV	HASIL PROYEKSI DAN ANALISIS.....	IV-1
4.1	Kondisi Ekonomi di DIY 2011-2015	IV-1
4.2	Proyeksi Indikator Ekonomi DIY 2016-2020	IV-9
4.2.1.	PDRB.....	IV-9
4.2.2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	IV-12
4.2.3.	Inflasi.....	IV-13
4.2.4.	ICOR	IV-14
4.2.5.	Ketenagakerjaan	IV-15
4.2.6.	Kemiskinan.....	IV-19
4.2.7.	Indeks Williamson (IW).....	IV-20
4.2.8.	Indeks Gini (IG)	IV-22
4.3	Perubahan Asumsi Ekonomi Makro Tahun Lalu (2014/2015) dan Perkiraan Tahun berjalan (2015/2016)	IV-23
4.3.1.	PDRB ADHK 2010	IV-23
4.3.2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	IV-23
4.3.3.	Inflasi	IV-24
4.3.4.	ICOR	IV-24

Daftar Isi

4.3.5. Bekerja	IV-25
4.3.6. Pengangguran Terbuka	IV-25
4.3.7. Angkatan Kerja.....	IV-25
4.3.8. Kemiskinan	IV-26
4.3.9. Indeks Williamson	IV-26
4.3.10. Indeks Gini	IV-27
4.3.11. Ketimpangan	IV-27
4.4 Skema Pencapaian Target Pertumbuhan Ekonomi RPJMD 2012-2017.....	IV-38
4.4.1. Kabupaten Kulon Progo	IV-38
4.4.2. Kabupaten Bantul	IV-39
4.4.3. Kabupaten Gunungkidul.....	IV-41
4.4.4. Kabupaten Sleman	IV-42
4.4.5. Kota Yogyakarta	IV-44
4.5 Kondisi Perekonomian Global 2014-2015	IV-46
4.6 Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.....	IV-49
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	V-1
5.1 Kesimpulan.....	V-1
5.2 Rekomendasi	V-6
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Daftar Isi

	Halaman
Tabel 4.1	Perkembangan Nilai PDRBDIY ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 IV-2
Tabel 4.2	Perkembangan Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha DIY ADHK 2010, 2011-2015..... IV-7
Tabel 4.3	Proyeksi Nilai PDRB ADHK 2010 Kabupaten/Kota DIY Tahun 2016-2020 IV-11
Tabel 4.4	Proyeksi Inflasi DIY Tahun 2015-2020..... IV-13
Tabel 4.5	Proyeksi ICOR DIY Tahun 2015-2020..... IV-15
Tabel 4.6	Proyeksi Ketenagakerjaan DIY Tahun 2015-2020 IV-18
Tabel 4.7	Proyeksi Persentase Penduduk Miskin Terhadap Penduduk DIY Tahun 2016-2020 IV-20
Tabel 4.8	Proyeksi IW DIY Tahun 2015-2020..... IV-21
Tabel 4.9	Proyeksi Indeks Gini DIY Tahun 2015-2020 IV-22
Tabel 4.10	PDRB ADHK 2010 DIY Tahun 2014/2015 dan 2015/2016 IV-23
Tabel 4.11	Laju Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2014/2015 dan 2015/2016 ... IV-23
Tabel 4.12	Inflasi DIY Tahun 2014/2015 dan 2015/2016 IV-24
Tabel 4.13	ICOR DIY Tahun 2014/2015 dan 2015/2016 IV-24
Tabel 4.14	Bekerja DIY Tahun 2014/2015 dan 2015/2016 IV-25
Tabel 4.15	Pengangguran Terbuka DIY Tahun 2014/2015 dan 2015/2016 IV-25
Tabel 4.16	Angkatan Kerja DIY Tahun 2014/2015 dan 2015/2016 IV-25
Tabel 4.17	Kemiskinan DIY Tahun 2014/2015 dan 2015/2016 IV-26
Tabel 4.18	Indeks Williamson DIY Tahun 2014/2015 dan 2015/2016 IV-26

Halaman

Tabel 4.19	Indeks Gini DIY Tahun 2014/2015 dan 2015/2016 IV-27
------------	---

Tabel 4.20	Nilai Investasi menurut Kabupaten/Kota di DIY atas Dasar Harga Konstan 2010, 2011-2015.....	IV-28
Tabel 4.21	ICOR Kabupaten/Kota di DIY dengan Pendekatan Investasi=PMBT+perubahan inventori, 2011-2015	IV-29
Tabel 4.22	Nilai dan <i>Share</i> PDRB Kabupaten dan Kota Terhadap PDRB DIY	IV-30
Tabel 4.23	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota dan DIY ADHK Tahun 2000 Tahun 2012-2015	IV-30
Tabel 4.24	Tingkat Pendapatan Per kapita ADHB 2000 Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2010 – 2014	IV-31
Tabel 4.25	Perkembangan Lapangan Usaha Primer Berdasarkan PDRB ADHK 2010 DIY Tahun 2010-2015	IV-34
Tabel 4.26	Perkembangan Lapangan Usaha Sekunder Berdasarkan PDRB ADHK 2010 DIY Tahun 2010-2015	IV-34
Tabel 4.27	Perkembangan Lapangan Usaha Tersier Berdasarkan PDRB ADHK 2010 DIY Tahun 2010-2015	IV-35
Tabel 4.28	Perkembangan Lapangan Usaha Primer, Sekunder dan Tersier Berdasarkan PDRB ADHK 2010 DIY Tahun 2010-2015	IV-37
Tabel 4.29	Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kulon Progo 2016-2017 ..	IV-38
Tabel 4.30	PDRB Lapangan Usaha Kabupaten Kulon Progo	IV-38
Tabel 4.31	Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul 2016-2017	IV-39
Tabel 4.32	PDRB Lapangan Usaha Kabupaten Bantul	IV-40
Tabel 4.33	Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunung Kidul 2016-2017.....	IV-41
Tabel 4.34	PDRB Lapangan Usaha Kabupaten Gunung Kidul	IV-41
Halaman		
Tabel 4.35	Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sleman 2016-2017	IV-43

Daftar Isi

Tabel 4.36	PDRB Lapangan Usaha Kabupaten Sleman.....	IV-43
Tabel 4.37	Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kota Yogyakarta 2016- 2017	IV-44
Tabel 4.38	PDRB Lapangan Usaha Kabupaten Kota Yogyakarta	IV-45

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Grafik 4.1 PDRB ADHK 2010 DIY Tahun 2010-2020	IV-9
Grafik 4.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2011-2020	IV-12
Grafik 4.3 Inflasi DIY	IV-13
Grafik 4.4 ICOR DIY Tahun 2008-2020.....	IV-14
Grafik 4.5 Bekerja DIY Tahun 2008-2020.....	IV-15
Grafik 4.6 Pengangguran Terbuka DIY Tahun 2008-2020	IV-16
Grafik 4.7 Angkatan Kerja DIY Tahun 2008-2020	IV-17
Grafik 4.8 Persentase Penduduk Miskin Terhadap Penduduk DIY Tahun 2008-2020	IV-19
Grafik 4.9 IW DIY Tahun 2008-2020.....	IV-21
Grafik 4.10 Indeks Gini DIY Tahun 2008-2020	IV-22
Grafik 4.11 Tripologi Klassen 2010	IV-32
Grafik 4.12 Tripologi Klassen 2014.....	IV-33
Grafik 4.13 Perkembangan Lapangan Usaha Primer, Sekunder dan Tersier Berdasarkan PDRB ADHK 2010 DIY Tahun 2010-2015	IV-37

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) seperti semua daerah di Indonesia melaksanakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya melalui proses pembangunan. Pembangunan adalah sebuah proses yang direncanakan dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya baik dari aspek ekonomi, politik, budaya sosial maupun sarana prasarana.

Pembangunan yang dilaksanakan memerlukan perencanaan pembangunan yang memadai. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang dari aspek waktu meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dalam periode 20 tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam periode lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam periode tahunan.

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang disusun setiap tahun di mana dokumen ini mengejawantahkan visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah. RKPD yang telah ditetapkan digunakan sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang akhirnya menjadi dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam dokumen RKPD membutuhkan analisis ekonomi daerah yang dimaksudkan untuk menilai sejauhmana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi dan mengetahui sejauhmana capaian indikator ekonomi sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Disamping itu, analisis ekonomi tersebut digunakan sebagai salah satu input utama dalam membuat analisis keuangan daerah. Dalam rangka menyediakan materi analisis ekonomi tersebut, Bappeda sebagai lembaga yang menyusun RKPD melaksanakan kajian analisis ekonomi makro daerah.

1.2. Maksud

Maksud dari pekerjaan penyusunan Analisis Makro Ekonomi DIY untuk menyediakan data dan analisis ekonomi makro DIY secara makro dalam perencanaan pembangunan.

1.3. Tujuan

1. Mengetahui kondisi ekonomi DIY 2011-2015, yang mencakup indikator pertumbuhan ekonomi;
2. Mengetahui angka proyeksi indikator ekonomi DIY 2016-2020 dan analisis asumsi yang digunakan (nilai PDRB, laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, ICOR, ketenagakerjaan, kemiskinan, IW, Indeks Gini);
3. Mengetahui perubahan asumsi ekonomi makro DIY tahun lalu (2014/2015) dan perkiraan tahun berjalan (2016/2017); dengan isu strategis kondisi perekonomian global dan implementasi masyarakat ekonomi ASEAN.
4. Mengetahui skenario pencapaian target pertumbuhan ekonomi provinsi dan kabupaten/kota yang didasarkan pada RPJMD DIY 2012-2017.

1.4. Sasaran

Tersusunnya buku Analisis Makro Ekonomi DIY.

1.5. Manfaat

Manfaat hasil Penyusunan Analisis Makro Ekonomi DIY adalah untuk menjadi salah satu dasar rekomendasi kebijakan perencanaan pembangunan di DIY.

1.6 Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan pengumpulan data dan perhitungan serta analisis di DIY.

1.7 Sumber Pendanaan

Sumber dana pelaksanaan pekerjaan penyusunan Analisis Makro Ekonomi DIY dibebankan pada APBD DIY Tahun Anggaran 2016 (Balai Statistik Daerah).

1.8. Lingkup Pekerjaan

1. Menganalisis kondisi ekonomi 2011-2015, yang mencakup indikator pertumbuhan ekonomi;

2. Menyediakan angka proyeksi indikator ekonomi DIY 2016-2020 dan analisis asumsi yang digunakan (nilai PDRB, laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, ICOR, ketenagakerjaan, kemiskinan, IW, Indeks Gini);
3. Menganalisis perubahan asumsi ekonomi makro DIY tahun lalu (2014/2015) dan perkiraan tahun berjalan (2016/2017); dengan isu strategis kondisi perekonomian global dan implementasi masyarakat ekonomi ASEAN.
4. Menyusun skenario pencapaian target pertumbuhan ekonomi provinsi dan kabupaten/kota yang didasarkan pada RPJMD DIY 2012-2017.

1.9. Keluaran

1. Hasil analisis kondisi ekonomi 2011-2015, yang mencakup indikator pertumbuhan ekonomi;
2. Angka proyeksi angka proyeksi indikator ekonomi DIY 2016-2020 dan analisis asumsi yang digunakan (nilai PDRB, laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, ICOR, ketenagakerjaan, kemiskinan, IW, Indeks Gini);
3. Hasil analisis perubahan asumsi ekonomi makro DIY tahun lalu (2014/2015) dan perkiraan tahun berjalan (2016/2017); dengan isu strategis kondisi perekonomian global dan implementasi masyarakat ekonomi ASEAN.
4. Skenario pencapaian target pertumbuhan ekonomi provinsi dan kabupaten/kota yang didasarkan pada RPJMD DIY 2012-2017.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Konsep dan Definisi PDRB

2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah/wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi dalam suatu daerah/wilayah pada suatu periode tertentu. Data PDRB dapat dihitung dengan tiga pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan produksi, PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha/ekonomi dalam suatu daerah/wilayah pada suatu periode tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit ekonomi tersebut dalam analisis ini dengan mendasari pada PDRB ADHK 2010 dikelompokkan menjadi lapangan usaha/sektor, yaitu: A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; B. Pertambangan dan Penggalian; C. Industri Pengolahan; D. Pengadaan Listrik, Gas; E. Pengadaan Air; F. Konstruksi; G.. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; H. Transportasi dan Pergudangan; I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; J. Informasi dan Komunikasi; K. Jasa Keuangan; L. Real Estate; M, N. Jasa Perusahaan; O. Administrasi Pemerintahan; Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; P. Jasa Pendidikan; Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; R,S,T,U. Jasa lainnya.

b. Pendekatan Pengeluaran

Menurut pendekatan pengeluaran, PDRB merupakan jumlah semua komponen permintaan akhir di suatu daerah/wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Komponen permintaan akhir meliputi: *pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori/stok, dan ekspor neto.*

c. Pendekatan Pendapatan

Menurut pendekatan pendapatan, PDRB merupakan jumlah seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah/wilayah pada jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Komponen balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah: *upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan*

keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga *penyusutan barang modal tetap* dan *pajak tak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi)*. Jumlah semua komponen pendapatan ini per sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu, PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor (lapangan usaha).

Angka PDRB hasil perhitungan dari **ketiga pendekatan** tersebut **secara teoritis akan sama**. Selanjutnya, PDRB seperti yang diuraikan di atas disebut sebagai PDRB atas dasar **harga pasar** karena mencakup **penyusutan** dan **pajak tak langsung neto**.

2.1.2 Turunan Produk Domestik Regional Bruto

a. PDRB atas dasar Harga Pasar

PDRB atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu daerah/wilayah, termasuk penyusutan dan pajak tak langsung neto.

Sedangkan menurut BPS, Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (*output*) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar.

b. Produk Domestik Regional Neto (PDRN) atas dasar Harga Pasar

PDRN atas dasar harga pasar merupakan PDRB atas dasar harga pasar dikurangi dengan penyusutan. Penyusutan yang dimaksud adalah nilai susutnya barang-barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi selama setahun.

c. PDRB atas dasar Biaya Faktor

PDRB atas dasar biaya faktor adalah PDRB atas dasar harga pasar dikurangi pajak tak langsung neto. Pajak tak langsung neto merupakan pajak tak langsung yang dipungut pemerintah dikurangi dengan subsidi pemerintah. Baik pajak tak langsung maupun subsidi, keduanya dikenakan terhadap barang dan jasa yang diproduksi atau dijual. Pajak tak langsung bersifat menaikkan harga jual, sedangkan subsidi sebaliknya. Selanjutnya, PDRB atas dasar biaya faktor disebut sebagai **Pendapatan Regional**.

d. PDRB per Kapita

PDRB per kapita adalah PDRB dibagi dengan **jumlah penduduk pada pertengahan tahun**. Terdapat dua ukuran PDRB per kapita, yaitu PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (nominal) dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan (riil).

2.1.3 Metode Penghitungan

2.1.3.1 Penghitungan PDRB atas dasar Harga Berlaku

Penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku dilakukan dengan dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Pada metode langsung dikenal ada tiga macam pendekatan penghitungan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Sedangkan metode tidak langsung diperlukan dalam penghitungan PDRB jika data tidak tersedia (belum lengkap). Metode tidak langsung adalah metode penghitungan dengan cara alokasi menggunakan indikator produksi yang sesuai, seperti: jumlah produksi fisik, tenaga kerja, penduduk, dan alokator lainnya.

2.1.3.2 Penghitungan PDRB atas dasar Harga Konstan

Penghitungan PDRB atas dasar harga konstan bertujuan untuk melihat pertumbuhan PDRB secara riil. Dikenal empat cara untuk menghitung nilai tambah atas dasar harga konstan, yaitu revaluasi, ekstrapolasi, deflasi, dan deflasi berganda.

a. Revaluasi

Prinsip metode revaluasi adalah menilai barang dan jasa pada tahun berjalan dengan menggunakan harga pada tahun dasar. Dalam hal ini, tahun dasar yang dipakai adalah tahun 2010. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan diperoleh dari selisih antara output dan biaya antara masing-masing atas dasar harga konstan. Dalam praktek, sangat sulit melakukan revaluasi terhadap biaya antara yang digunakan dalam proses produksi, karena selain mencakup komponen input yang sangat banyak, data harga yang tersedia juga tidak dapat memenuhi semua keperluan tersebut. Oleh karena itu, biaya antara atas dasar harga konstan biasanya diperoleh dari perkalian antara output atas dasar harga konstan dengan rasio tertentu. Rasio tersebut diperoleh dari hasil bagi biaya antara dengan output pada tahun dasar.

b. Ekstrapolasi

Menurut metode ekstrapolasi, nilai tambah atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara mengalikan nilai tambah pada tahun dasar 2010 dengan indeks produksi. Indeks produksi sebagai ekstrapolator dapat merupakan indeks dari masing-masing produksi yang dihasilkan ataupun indeks dari berbagai indikator produksi seperti tenaga kerja, jumlah perusahaan dan lainnya, yang dianggap cocok dengan jenis kegiatannya.

Ekstrapolasi dapat juga dilakukan terhadap output pada tahun dasar 2010. Dengan mengalikan output atas dasar harga konstan dengan rasio tetap nilai tambah terhadap output pada tahun dasar teori pertumbuhan ekonomi 2010, maka diperoleh perkiraan nilai tambah atas dasar harga konstan.

c. Deflasi

Menurut metode deflasi, nilai tambah atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara membagi nilai tambah atas dasar harga berlaku pada tahun berjalan dengan indeks harga yang sesuai. Indeks harga yang dimaksud dapat juga dipakai sebagai inflator, dalam keadaan di mana nilai tambah atas dasar harga berlaku justru diperoleh dengan mengalikan nilai tambah atas dasar harga konstan dengan indeks harga tersebut.

d. Deflasi Berganda

Dalam metode deflasi berganda ini, yang dideflasi adalah output dan biaya antaranya, sedangkan nilai tambah atas dasar harga konstan diperoleh dari selisih antara output dengan biaya antara hasil deflasi tersebut. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator untuk penghitungan output atas dasar harga konstan biasanya menggunakan indeks harga produsen atau indeks harga perdagangan besar (IHPB) sesuai dengan cakupan komoditasnya. Sedangkan deflator untuk biaya antara adalah indeks harga dari komponen input terbesar. Pada kenyataannya sangat sulit melakukan deflasi terhadap biaya antara, karena selain komponennya terlalu banyak, juga karena indeks harganya belum tersedia secara baik. Oleh karena itu dalam penghitungan harga konstan, deflasi berganda ini belum banyak dipakai.

2.1.4 Penghitungan PDRB menurut Lapangan Usaha

Pada tahun 2015, BPS melakukan perubahan tahun dasar untuk perhitungan PDRB dari tahun dasar 2000 menjadi tahun dasar 2010. Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena beberapa alasan berikut (BPS):

1. Perekonomian Indonesia tahun 2010 relatif stabil;
2. Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terutama dibidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru;
3. Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun;
4. Adanya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, sumber data dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA2008;

5. Tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDRB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP2010) dan Indeks harga produsen (*Producers Price Index* /PPI);
6. Tersedianya kerangka kerja SUT yang menggambarkan keseimbangan aliran produksi dan konsumsi (barang dan jasa) dan penciptaan pendapatan dari aktivitas produksi tersebut

Adapun sektor utama PDRB harga konstan 2010 yakni: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa lainnya.

2.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah. Suatu wilayah mengalami pertumbuhan secara ekonomi bila terjadi peningkatan kapasitas produksi dari semua kegiatan ekonomi di dalam wilayahnya secara terukur. Selama beberapa dekade, pembangunan daerah selalu berupaya memperoleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tanpa melihat apakah pertumbuhan tersebut bermanfaat bagi kesejahteraan penduduk secara merata atau tidak. Perkembangan selanjutnya, para pengambil kebijakan pembangunan daerah mulai memperhitungkan manfaat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat, sehingga tingkat pemerataan mulai menjadi suatu indikator bagi kesejahteraan.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada penciptaan kesempatan kerja dan berpihak pada penurunan angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja sehingga dapat menyerap tenaga kerja secara berkesinambungan. Kesempatan kerja yang semakin luas akan meningkatkan serapan tenaga kerja sehingga menjadi faktor penting dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menjadi indikator semakin tingginya pendapatan masyarakat sehingga tingkat kemiskinan menjadi semakin berkurang.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang. Istilah “proses” berarti mengandung unsur dinamis, perubahan atau

perkembangan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi biasanya dilihat dalam kurun waktu tertentu. Jika kurun waktu yang diamati dalam satu tahun, maka pertumbuhan ekonomi direpresentasikan dalam indeks berantai PDRB atas dasar harga konstan dikurangi 100 persen atau diformulasikan sebagai berikut:

$$PE = \frac{PDRB_t - PDRB_{(t-1)}}{PDRB_{(t-1)}} \times 100\% \dots\dots\dots(2.1)$$

keterangan :

PE = Pertumbuhan ekonomi

$PDRB_t$ = Produk Domestik Regional Bruto harga konstan tahun ke t

$PDRB_{(t-1)}$ = Produk Domestik Regional Bruto harga konstan tahun ke (t-1)

2.3. Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus Sukirno (2004). Akan tetapi bila kenaikan harga hanya dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau menyebabkan kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain (Boediono,2000). Bahkan mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidak bersamaan. Kenaikan harga barang yang terjadi hanya sekali saja, meskipun dalam persentase yang cukup besar dan terus-menerus, bukanlah merupakan inflasi (Nopirin, 2000).

Dari kutipan di atas diketahui bahwa inflasi adalah keadaan di mana terjadi kelebihan permintaan (*Excess Demand*) terhadap barang-barang dalam perekonomian secara keseluruhan. Inflasi sebagai suatu kenaikan harga yang terus menerus dari barang dan jasa secara umum (bukan satu macam barang saja dan sesaat. Naiknya biaya produksi yang meningkat juga dapat menyebabkan inflasi yang biasa disebut dengan *cost push inflation* dan inflasi yang berasal dari naiknya harga impor secara keseluruhan yang disebut sebagai *imported inflation*. Menurut definisi ini, kenaikan harga yang sporadis bukan dikatakan sebagai inflasi.

2.3.1. Dampak Inflasi

Inflasi dapat mempengaruhi distribusi pendapatan, alokasi faktor produksi serta produk nasional. Efek terhadap distribusi pendapatan disebut dengan *equity effect*, sedangkan efek terhadap alokasi faktor produksi dan pendapatan nasional masing-masing disebut dengan *efficiency* dan *output effects* (Nopirin, 2000).

a. Efek terhadap Pendapatan (*Equity Effect*).

Efek terhadap pendapatan sifatnya tidak merata, ada yang dirugikan tetapi ada pula yang diuntungkan dengan adanya inflasi. Seseorang yang memperoleh pendapatan tetap akan dirugikan oleh adanya inflasi. Demikian juga orang yang menumpuk kekayaannya dalam bentuk uang kas akan menderita kerugian karena adanya inflasi. Sebaliknya, pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dengan adanya inflasi adalah mereka yang memperoleh kenaikan pendapatan dengan persentase yang lebih besar dari laju inflasi, atau mereka yang mempunyai kekayaan bukan uang di mana nilainya naik dengan persentase lebih besar dari pada laju inflasi. Dengan demikian inflasi dapat menyebabkan terjadinya perubahan dalam pola pembagian pendapatan dan kekayaan masyarakat.

b. Efek terhadap Efisiensi (*Efficiency Effects*).

Inflasi dapat pula mengubah pola alokasi faktor-faktor produksi. Perubahan ini dapat terjadi melalui kenaikan permintaan akan berbagai macam barang yang kemudian dapat mendorong terjadinya perubahan dalam produksi beberapa barang tertentu. Dengan adanya inflasi permintaan akan barang tertentu mengalami kenaikan yang lebih besar dari barang lain, yang kemudian mendorong terjadinya kenaikan produksi barang tertentu.

c. Efek terhadap *Output* (*Output Effects*).

Inflasi mungkin dapat menyebabkan terjadinya kenaikan produksi. Alasannya dalam keadaan inflasi biasanya kenaikan harga barang mendahului kenaikan upah sehingga keuntungan pengusaha naik. Kenaikan keuntungan ini akan mendorong kenaikan produksi. Namun apabila laju inflasi ini cukup tinggi (*hyper inflation*) dapat mempunyai akibat sebaliknya, yakni penurunan *output*. Dalam keadaan inflasi yang tinggi, nilai uang riil turun dengan drastis, masyarakat cenderung tidak mempunyai uang kas, transaksi mengarah ke barter, yang biasanya diikuti dengan turunnya produksi barang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan langsung antara inflasi dan output. Inflasi bisa dibarengi dengan kenaikan output, tetapi bisa juga dibarengi dengan penurunan *output*.

2.3.2.Sumber-Sumber Penyebab Inflasi

a. *Demand Pull Inflation*

Demand pull inflation adalah kenaikan harga-harga yang disebabkan oleh adanya gangguan (*shock*) pada sisi permintaan barang dan jasa. Kenaikan permintaan barang yang tidak seimbang dengan kenaikan penawaran akan mendorong harga naik sehingga terjadi inflasi. Dalam *demand pull inflation*, kenaikan harga barang akhir (*output*) mendahului kenaikan harga barang input dan harga faktor produksi (misalnya tingkat upah).

Inflasi ini bermula dari adanya kenaikan permintaan total (*aggregate demand*), sedangkan produksi sudah berada pada keadaan kesempatan kerja penuh atau hampir mendekati keadaan kesempatan kerja penuh (*full employment*). Dalam keadaan hampir mendekati *full employment*, kenaikan permintaan total disamping menaikkan harga juga dapat menaikkan hasil produksi atau output. Akan tetapi, bila keadaan *full employment* telah tercapai, penambahan permintaan tidak akan menambah jumlah produksi melainkan hanya akan menaikkan harga saja sehingga sering disebut dengan inflasi murni.

b. Supply Side Inflation

Berbeda dengan *demand pull inflation*, *cost push inflation* adalah inflasi yang disebabkan oleh adanya gangguan (*shock*) dari sisi penawaran barang dan jasa atau yang biasa juga disebut dengan *supply shock inflation*, biasanya ditandai dengan kenaikan harga yang disertai oleh turunnya produksi atau output. Jadi inflasi yang dibarengi dengan resesi. Keadaan ini timbul biasanya dimulai dengan adanya penurunan penawaran total (*aggregate supply*) sebagai akibat kenaikan biaya produksi.

Kekakuan struktural sendiri terjadi karena anggapan bahwa sumber daya ekonomi tidak dapat dengan cepat diubah pemanfaatannya dan juga bahwa upah dan tingkat harga mudah naik tapi sukar untuk turun kembali (*rigidity of price*). Dengan asumsi ini, bila terjadi perubahan pola permintaan dan biaya, maka mobilitas sumber daya dari sektor yang kurang berkembang ke sektor yang berkembang akan sulit sekali, sehingga suatu sektor yang kurang berkembang akan terjadi *idle capacity*, sedangkan sektor yang berkembang akan kekurangan sumber daya. Dan hal ini justru mendorong meningkatnya harga pada sektor yang berkembang. Kekakuan di sektor yang lemah dan kenaikan harga di sektor yang berkembang menyebabkan inflasi.

c. Demand Supply Inflation

Peningkatan permintaan total (*aggregate demand*) menyebabkan kenaikan harga yang selanjutnya diikuti oleh penurunan penawaran total (*aggregate supply*) sehingga menyebabkan kenaikan harga yang lebih tinggi lagi. Interaksi antara bertambahnya permintaan total dan berkurangnya penawaran total yang mendorong kenaikan harga ini merupakan akibat adanya ekspektasi bahwa tingkat harga dan tingkat upah akan meningkat atau dapat juga karena adanya inersia dari inflasi di masa lalu

2.3.3. Inflasi Menurut Asalnya

Berdasarkan asal-usulnya, maka inflasi dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*) dan inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*), (Nopirin, 1994).

1. Inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*)

Inflasi ini disebabkan oleh adanya *shock* dari dalam negeri, baik karena tindakan masyarakat maupun tindakan pemerintah dalam melakukan kebijakan-kebijakan perekonomian.

2. Inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*)

Imported inflation adalah inflasi yang terjadi di dalam negeri karena adanya pengaruh kenaikan harga dari luar negeri, terutama kenaikan harga barang-barang impor yang selanjutnya juga berdampak pada kenaikan harga barang-barang *input* produksi yang masih belum bisa diproduksi secara domestik.

2.4. ICOR

2.4.1. Pengertian ICOR

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) adalah suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output. Besaran ICOR diperoleh dengan membandingkan besarnya tambahan kapital dengan tambahan output. Karena unit kapital bentuknya berbeda-beda dan beraneka ragam sementara unit output relatif tidak berbeda, maka untuk memudahkan penghitungan keduanya dinilai dalam bentuk uang (nominal).

Pengkajian mengenai ICOR menjadi sangat menarik karena ICOR dapat merefleksikan besarnya produktifitas kapital yang pada akhirnya menyangkut besarnya pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai. Secara teoritis hubungan ICOR dengan pertumbuhan ekonomi dikembangkan pertama kali oleh **R.F. Harrod** dan **Evsey Domar**. Profesor Evsey Domar, seorang ekonom Amerika Serikat, (1939) dan Sir Roy Harrod, seorang ekonom Inggris, (1947), mengembangkan suatu koefisien yang diturunkan dari suatu rumus tentang pertumbuhan ekonomi. Namun karena kedua teori tersebut banyak kesamaannya, maka kemudian teori tersebut lebih dikenal sebagai teori Harrod-Domar. Koefisien itu mengaitkan pertambahan kapasitas terpasang (*capital*) dengan pertumbuhan ekonomi (output).

Teori Harrod – Domar mempunyai beberapa asumsi:

- a. Perekonomian dalam pengerjaan penuh dan barang-barang modal dalam masyarakat digunakan sepenuhnya.

- b. Perekonomian terdiri dari dua sektor, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Ini berarti dalam analisis dianggap tidak terdapat sektor pemerintah dan sektor luar negeri.
- c. Besarnya tabungan masyarakat adalah merupakan fraksi tertentu dari besarnya pendapatan nasional. Ini berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol.
- d. Kecenderungan masyarakat untuk menabung (*marginal propensity to save* = MPS) besarnya tetap, demikian juga rasio antara modal – output (*capital output ratio* = COR) dan rasio pertambahan modal-output (*incremental capital output ratio* = ICOR).

Pada dasarnya teori tentang ICOR dilandasi oleh dua macam konsep yaitu:

(i) **Rasio Modal-Output** atau **Capital Output Ratio (COR)** atau sering disebut sebagai **Average Capital Output Ratio (ACOR)**, yaitu perbandingan antara kapital yang digunakan dengan output yang dihasilkan pada suatu periode tertentu. COR atau ACOR ini bersifat statis karena hanya menunjukkan besaran yang menggambarkan perbandingan modal dan output.

(ii) **Rasio Modal-Output Marginal** atau **Incremental Capital Output Ratio (ICOR)** yaitu suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output baik secara fisik maupun secara nilai (uang). Konsep ICOR ini lebih bersifat **dinamis** karena menunjukkan perubahan /penambahan output sebagai akibat langsung dari penambahan kapital.

Dari pengertian pada butir (ii), maka ICOR bisa diformulasikan sebagai berikut:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y}$$

keterangan:

ΔK = investasi, atau penambahan barang modal baru/kapasitas terpasang

ΔY = pertambahan output

Dalam perkembangannya, data yang digunakan untuk menghitung ICOR bukan lagi hanya penambahan barang modal baru atau perubahan stok kapital, melainkan Investasi (I) yang ditanam baik oleh swasta maupun pemerintah sehingga rumusan ICOR dimodifikasi menjadi:

$$ICOR = \frac{I}{\Delta Y}$$

keterangan:

I = Investasi

ΔY = perubahan output

Pada kenyataannya pertambahan output bukan hanya disebabkan oleh investasi, tetapi juga oleh faktor-faktor lain di luar investasi seperti: pemakaian tenaga kerja, penerapan teknologi, dan kemampuan kewiraswastaan. Dengan demikian, untuk melihat peranan investasi terhadap output berdasarkan konsep ICOR, maka peranan faktor-faktor selain investasi diasumsikan konstan (*ceteris paribus*).

2.4.2. Pengertian Investasi

Investasi merupakan salah satu komponen yang penting dalam pembangunan ekonomi karena investasi mempunyai keterkaitan dengan keberlangsungan kegiatan ekonomi di masa yang akan datang. Dengan melakukan investasi diharapkan kapasitas produksi dapat ditingkatkan, yang berarti peningkatan output. Sehingga dengan peningkatan output akan meningkatkan pendapatan. Dalam jangka panjang akumulasi investasi dapat mendorong perkembangan berbagai aktivitas ekonomi sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah/negara.

Pemahaman kondisi tersebut memberikan pengertian pentingnya informasi investasi. Berdasarkan buku panduan yang diterbitkan oleh *United Nations (PBB)* mengenai penyusunan neraca nasional yang disebut *System of National Accounts (SNA)*, besarnya investasi yang direalisasikan di suatu wilayah/negara pada suatu tahun tertentu adalah sama dengan jumlah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) plus perubahan inventori/stok. PMTB menggambarkan investasi fisik domestik yang telah direalisasikan pada suatu tahun tertentu dalam bentuk berbagai jenis barang kapital, seperti: bangunan, mesin-mesin, alat-alat transportasi, dan barang modal lainnya; sedangkan inventori/stok meliputi output setengah jadi, atau input yang belum digunakan, termasuk juga barang jadi yang belum dijual. Inventori/stok termasuk dalam modal kerja yang merupakan bagian investasi yang direncanakan. Perubahan inventori merupakan selisih antara stok akhir dengan stok awal pada suatu periode tertentu.

Investasi dibedakan menjadi tiga jenis yaitu: fisik, finansial, dan sumber daya manusia (SDM). Investasi yang berwujud fisik dapat berupa: jalan, jembatan, gedung, kantor, mesin-mesin, mobil dan sebagainya. Investasi finansial dapat berupa: pembelian surat berharga, pembayaran premi asuransi, penyertaan modal dan investasi keuangan lainnya. Sedangkan investasi SDM dapat berupa pendidikan dan pelatihan. Adapun penekanan investasi di sini lebih kepada investasi yang berupa fisik.

Konsep investasi dalam penghitungan ICOR menggunakan konsep ekonomi nasional. Pengertian investasi yang dimaksud di sini adalah *fixed capital formation*/pembentukan barang modal tetap yang terdiri dari: tanah, gedung/konstruksi, mesin dan perlengkapannya, kendaraan, dan barang modal lainnya. Sementara itu nilai yang diperhitungkan mencakup:

- a. Pembelian barang baru dan barang bekas dari luar negeri,
- b. Pembuatan/perbaikan besar yang dilakukan pihak lain,
- c. Pembuatan/perbaikan besar yang dilakukan sendiri,
- d. Penjualan barang modal bekas.

Total nilai investasi diperoleh dari penjumlahan seluruh pembelian barang modal baru/bekas, pembuatan/perbaikan besar yang dilakukan oleh pihak lain dan sendiri dikurangi penjualan barang modal bekas.

2.4.2.1. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Secara konseptual, PMTB didefinisikan sebagai pengeluaran untuk pengadaan barang modal yang meliputi: pembuatan sendiri, pembelian barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru maupun bekas dari luar negeri, setelah dikurangi barang modal yang dijual atau yang diberikan kepada pihak lain. Barang modal adalah barang atau peralatan yang digunakan dalam proses produksi dan mempunyai umur pemakaian satu tahun atau lebih (disebut sebagai barang modal tetap; sedangkan bruto mencerminkan bahwa penghitungan PMTB belum dikurangi dengan penyusutan barang modal).

Secara lebih rinci PMTB pada dasarnya meliputi:

- a. Pembentukan modal berupa bangunan, mesin, angkutan dan perlengkapannya yang mempunyai umur pemakaian satu tahun atau lebih.
- b. Perbaikan besar, maksudnya biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan barang modal untuk meningkatkan mutu barang modal tersebut atau menambah umur pakai barang modal.
- c. Biaya untuk pengembangan atau perbaikan lahan, penanaman kembali hutan, perluasan daerah pertambangan, penanaman dan peremajaan tanaman keras.
- d. Pembelian ternak untuk pembiakan, pemerahan susu, atau sebagai alat angkutan, tetapi tidak termasuk ternak potong untuk konsumsi.
- e. Margin perdagangan dan ongkos-ongkos yang berkaitan dengan transaksi jual beli tanah, hak paten, hak cipta, dan sebagainya.

2.4.2.2. Klasifikasi PMTB

PMTB dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. PMTB menurut jenis barang modal,
- b. PMTB menurut lapangan usaha/sektor,
- c. PMTB menurut institusi.

2.4.2.2.1. PMTB menurut jenis barang modal

PMTB menurut jenis barang modal dapat dibedakan atas:

- a. Pembentukan modal berupa bangunan, yaitu: bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, dan bangunan lainnya seperti: jalan raya, instalasi listrik, jaringan komunikasi, bendungan, pelabuhan, dan sebagainya.
- b. Pembentukan modal berupa mesin, seperti: mesin pertanian, mesin pertambangan, mesin industri, dan alat perabot serta perlengkapan untuk kantor, hotel, dan restoran.
- c. Pembentukan modal berupa alat angkutan seperti: mobil, bus, truk, kapal laut, pesawat, sepeda motor, dan sebagainya.
[Keterangan: yang dimaksud dalam PMTB adalah barang-barang modal yang digunakan untuk keperluan pabrik, kantor maupun usaha rumah tangga, tetapi tidak termasuk yang digunakan untuk konsumsi (*durable goods*)].
- d. Barang modal lainnya seperti: perluasan hutan; pengembangan/perluasan lahan; penanaman kembali hutan; ternak untuk pembiakan, pemerahan susu atau sebagai alat angkutan; perluasan areal pertambangan; dan sebagainya.

2.4.2.2.2. PMTB menurut Lapangan Usaha/Sektor

PMTB menurut lapangan usaha/sektor adalah:

A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; B. Pertambangan dan Penggalian; C. Industri Pengolahan; D. Pengadaan Listrik, Gas; E. Pengadaan Air; F. Konstruksi; G.. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor H. Transportasi dan Pergudangan; I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; J.. Informasi dan Komunikasi; K. Jasa Keuangan; L. Real Estate; M, N. Jasa Perusahaan; O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; P. Jasa Pendidikan; Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; R, S, T, U. Jasa lainnya.

2.4.2.2.3. PMTB menurut Institusi

PMTB menurut institusi dibedakan atas tiga kelompok berikut:

- a. Pemerintah. Yang dimaksud dengan pemerintah disini adalah pemerintah yang menyelenggarakan *general administration*, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengeluaran PMTB oleh pemerintah misalnya untuk membangun gedung kantor, pembelian mesin-mesin, komputer untuk menyelenggarakan tugas pemerintah sebagai *administration*, termasuk juga bila

pemerintah mengeluarkan biaya untuk kepentingan masyarakat yang bersifat infrastruktur, seperti: jalan raya, pembangunan irigasi, dan sebagainya.

- b. Korporasi/Perusahaan Swasta termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam kategori ini hanya pengeluaran investasi yang benar-benar dikuasai BUMN/BUMD, tetapi tidak termasuk pengeluaran biaya oleh pemerintah pada butir a. di atas. Kegiatan yang dicakup perusahaan meliputi sektor finansial dan nonfinansial.
- c. Rumah tangga dan Lembaga Swasta Nirlaba. Kegiatan membangun rumah baru atau memperbaiki rumah milik sendiri secara besar-besaran dianggap sebagai bagian dari pembentukan modal. Hal ini sesuai dengan keharusan mengimputasi sewa rumah penduduk (rumah tangga) baik milik sendiri maupun rumah dinas.

2.4.3. Pengertian Output

Output diartikan sebagai seluruh nilai produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh berbagai sektor produksi. Dengan kata lain, output merupakan “keluaran” atau hasil yang diperoleh dari pendayagunaan seluruh faktor produksi baik berbentuk barang atau jasa seperti: tanah, tenaga kerja, modal dan kewiraswastaan. Dari segi ekonomi nasional, output merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi domestik dalam suatu periode tertentu.

Dari segi perusahaan, output mencakup nilai barang (komoditi) jadi yang dihasilkan selama suatu periode tertentu ditambah nilai perubahan inventori/stok barang (komoditi) yang masih dalam proses. Output yang dimaksud adalah:

- a. Barang-barang yang dihasilkan.
- b. Tenaga listrik yang dijual.
- c. Selisih nilai stok setengah jadi.

Output ini dihitung atas dasar harga produsen, yaitu harga yang diterima oleh produsen pada tingkat transaksi pertama. Karena masih mengandung nilai penyusutan barang modal, output ini masih bersifat bruto. Untuk mendapatkan output neto atas harga pasar, output bruto atas harga pasar harus dikurangi dengan penyusutan barang modal.

Dalam pengertian ICOR, *output* adalah tambahan (*flow*) produk dari hasil kegiatan ekonomi dalam suatu periode atau nilai-nilai yang merupakan hasil pendayagunaan faktor-faktor produksi. Output ini merupakan seluruh nilai tambah atas dasar biaya faktor produksi yang dihasilkan dari seluruh kegiatan usaha. Seluruh output yang dihasilkan dinilai atas dasar harga produsen. Output juga merupakan nilai perolehan produsen atas kegiatan ekonomi produksinya.

2.4.4. Pengertian Nilai Tambah

Konsep Nilai Tambah berkaitan erat dengan konsep penghitungan *output*. Nilai Tambah Bruto (NTB) adalah nilai seluruh balas jasa faktor produksi yang meliputi upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tidak langsung (neto). Dengan kata lain, nilai tambah adalah suatu tambahan nilai pada nilai input antara yang digunakan dalam proses menghasilkan barang/jasa. Nilai input antara tersebut bertambah karena input antara tersebut telah mengalami proses produksi yang mengubahnya menjadi barang yang nilainya lebih tinggi. Sedangkan input antara mencakup nilai seluruh komoditi yang habis atau dianggap habis dalam suatu proses produksi, seperti: bahan baku, bahan bakar, pemakaian listrik, dan sebagainya. Barang yang digunakan sebagai alat dalam suatu proses produksi dan umurnya kurang dari setahun dan habis dipakai dimasukkan sebagai input antara (bukan barang modal).

Penghitungan nilai tambah bruto atas dasar harga pasar dari suatu unit produksi adalah output bruto atas dasar harga produsen dikurangi input antara atas dasar harga pasar. Karena keterbatasan data penyusutan barang modal dan pajak tak langsung, maka pendekatan nilai tambah bruto inilah yang dipakai untuk penghitungan ICOR ini.

2.5. Ketenagakerjaan

Penduduk merupakan sumber daya yang penting dalam pembangunan. Keberadaan mereka dapat menjadi faktor yang mendukung atau menghambat pembangunan, tergantung kualitasnya. Kualitas penduduk dapat diukur dengan beberapa indikator, antara lain:

2.4.2.1 Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*)

Angka beban tanggungan menunjukkan tingkat ketergantungan penduduk yang dianggap tidak produktif (usia kurang dari 15 tahun atau 65 tahun ke atas) terhadap penduduk usia produktif (15 tahun sampai 64 tahun). Formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$DR = \frac{Jml\ Penduduk_{0-4} + Jml\ Penduduk_{65+}}{Jml\ Penduduk_{5-65}} \dots\dots\dots(2.3)$$

Angka beban tanggungan masih merupakan indikator yang sangat sederhana karena produktivitas penduduk hanya dilihat dari usia, bukan dari kegiatan produktifnya (angkatan kerja).

2.4.2.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Kesempatan memperoleh pekerjaan telah dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD'45) pasal 27 ayat 2. Setiap penduduk yang mampu dan mau bekerja diharapkan akan memperoleh pekerjaan yang sesuai disertai dengan jaminan perlindungan kerja yang manusiawi, termasuk di dalamnya memperoleh upah yang cukup untuk hidup layak. Namun harapan tersebut masih jauh dari kenyataan yang terjadi.

Dalam konsep ketenagakerjaan yang digunakan oleh BPS atas saran dari *the International Labor Organization (ILO)*, penduduk dibagi menjadi 2 (dua) golongan yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. **Penduduk usia kerja** adalah penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih, yang digolongkan lagi menjadi 2 (dua) yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. **Angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, dan yang sedang mencari pekerjaan (pengangguran). **Bukan angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang kegiatannya tidak bekerja maupun mencari pekerjaan atau penduduk usia kerja dengan kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya, seperti cacat mental atau sebab lain sehingga tidak produktif.

Penduduk **bekerja** adalah penduduk yang memiliki kegiatan ekonomi dalam rangka memperoleh penghasilan, paling sedikit satu jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu; termasuk kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. **Penduduk yang mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja** adalah mereka yang mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panen, mogok, dan sebagainya. **Pengangguran terbuka** adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Konsep tersebut digambarkan dalam Gambar 2.1.

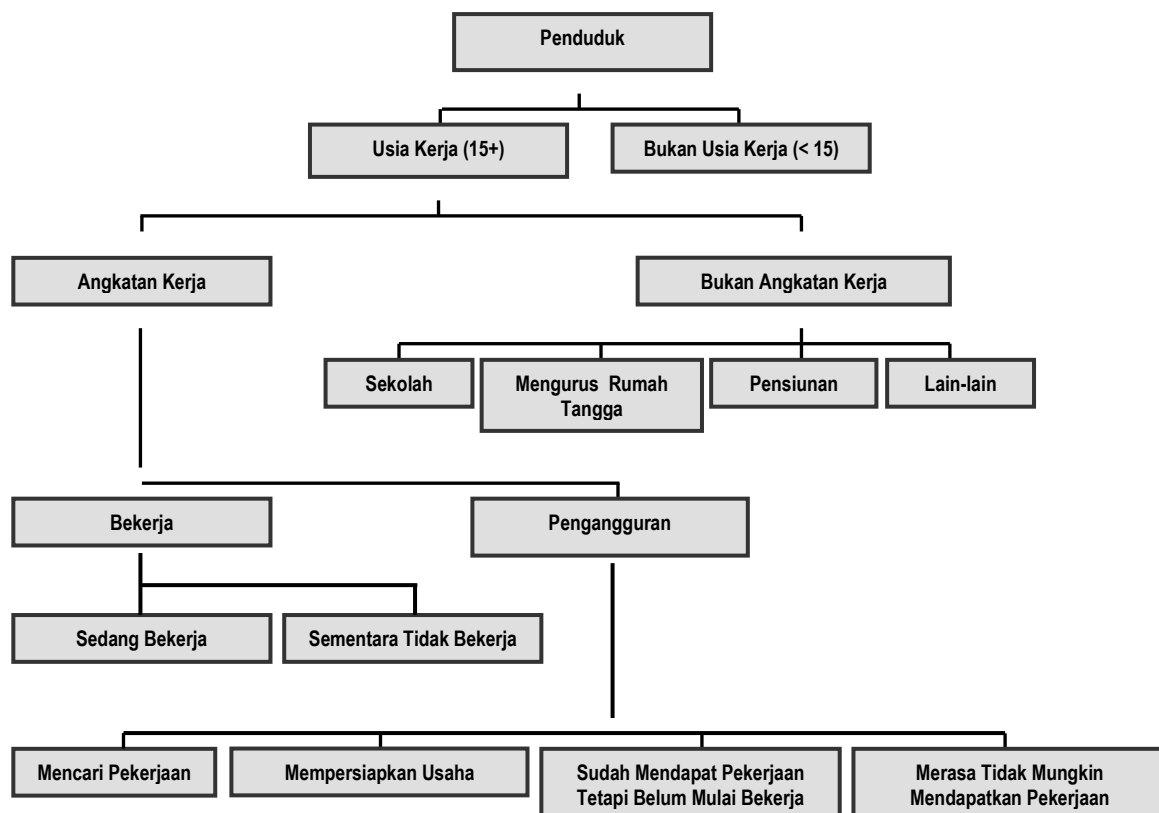
Beberapa konsep pokok ketenagakerjaan adalah:

- **Mencari pekerjaan** adalah kegiatan dari mereka yang berusaha mendapat pekerjaan. Kegiatan mencari pekerjaan tidak terbatas dalam jangka waktu seminggu yang lalu saja, tetapi bisa dilakukan beberapa waktu yang lalu di mana seminggu yang lalu masih dalam status menunggu jawaban lamaran. Jadi dalam kategori mencari pekerjaan juga dimasukkan mereka yang sedang memasukkan lamaran.

- **Penghasilan** mencakup upah/gaji termasuk semua tunjangan, bonus dan hasil usaha berupa sewa, bunga dan keuntungan, baik berupa uang atau natura/barang.
- **Hari kerja** adalah hari di mana seseorang melakukan kegiatan bekerja paling sedikit 1 jam terus menerus.
- **Jam kerja** adalah waktu yang dinyatakan dalam jam yang dipergunakan untuk bekerja.

Gambar 2.1.

Bagan Konsep Penduduk dan Tenaga Kerja



Sumber: BPS

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) dengan jumlah penduduk usia kerja, dan biasanya dinyatakan dalam persen.

$$TPAK = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\% \dots\dots\dots(2.4)$$

TPAK digunakan untuk mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu daerah atau wilayah. Selain itu, TPAK juga digunakan untuk menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja

(*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

2.4.2.3 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

Tingkat Kesempatan Kerja diukur dengan menggunakan rasio jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang sedang bekerja minimal 1 jam secara berturut-turut ataupun mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja di periode pencacahan terhadap total angkatan kerja.

$$TKK = \frac{\text{Jumlah penduduk bekerja}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\% \quad \dots\dots\dots(2.5)$$

TKK digunakan untuk mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang bekerja atau sementara tidak bekerja di suatu daerah atau wilayah.

Untuk keperluan analisis lebih lanjut, dapat dihitung **laju pertumbuhan kesempatan kerja (r_{KK})**, yaitu perbandingan antara selisih jumlah kesempatan kerja dalam 2 (dua) periode waktu terhadap jumlah kesempatan kerja pada periode waktu awal, dan biasanya dinyatakan dalam persen. Indikator ini digunakan untuk menyajikan laju pertumbuhan penduduk yang bekerja.

$$r_{KK} = \frac{B_t - B_{t-1}}{B_{t-1}} \times 100\% \quad \dots\dots\dots(2.6)$$

keterangan:

B_t = Jumlah penduduk yang bekerja tahun t

B_{t-1} = Jumlah penduduk yang bekerja tahun t-1

2.4.2.4 Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran merupakan salah satu target prioritas pembangunan yang perlu diturunkan. Tingkat pengangguran diindikasikan dengan beberapa ukuran, yaitu:

▪ Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT):

Tingkat pengangguran terbuka merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja, dan biasanya dinyatakan dalam persen. Kegunaannya adalah memberi indikasi tentang persentase penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran di suatu daerah atau wilayah.

$$TPT = \frac{\text{Jumlah pencari kerja}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\% \quad \dots\dots\dots(2.7)$$

2.4.2.5 Elastisitas Kesempatan Kerja (EKK)

Dalam neraca ketenagakerjaan biasanya dilihat jumlah angkatan kerja dan jumlah kesempatan kerja yang tersedia. Jika angkatan kerja lebih besar dari kesempatan kerja, maka akan terjadi pengangguran. Dengan kata lain, laju pertumbuhan angkatan kerja yang lebih besar dari laju pertumbuhan kesempatan kerja mengakibatkan peningkatan laju pertumbuhan pengangguran, demikian pula berlaku sebaliknya. Secara makro, laju pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi laju pertumbuhan kesempatan kerja. Hubungan kedua variabel tersebut dijelaskan oleh elastisitas kesempatan kerja yang dirumuskan sebagai berikut:

$$E_{KK} = \frac{r_{KK}}{r_{PDRB}} \dots\dots\dots(2.8)$$

keterangan:

E_{KK} = Elastisitas kesempatan kerja

r_{KK} = Laju pertumbuhan kesempatan kerja

r_{PDRB} = Laju pertumbuhan ekonomi

Semakin tinggi elastisitas kesempatan kerja berarti setiap laju pertumbuhan ekonomi akan mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas.

2.4.2.6 Produktivitas Tenaga Kerja (PTK)

Produktivitas tenaga kerja merupakan indikator kemampuan tenaga kerja dalam penciptaan nilai tambah. Pada kajian ini, produktivitas tenaga kerja diukur dengan membandingkan nilai tambah (PDRB) terhadap jumlah tenaga kerja yang terlibat pada setiap sektor. Oleh karena itu, produktivitas tenaga kerja yang dimaksud di sini merupakan produktivitas selama satu tahun.

$$PTK_i = \frac{PDRB_i}{TK_i} \dots\dots\dots(2.9)$$

keterangan:

PTK_i = Produktivitas tenaga kerja sektor ke-i

$PDRB_i$ = PDRB sektor ke-i

TK_i = Jumlah tenaga kerja sektor ke-i

Laju pertumbuhan produktivitas menunjukkan perkembangan produktivitas pada kurun waktu tertentu.

2.6. Kemiskinan

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi lebih berarti jika diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Kegiatan perekonomian yang bermuara pada orientasi pemerataan akan mengurangi masalah kemiskinan.

2.6.1 Indikator Kemiskinan

Ukuran kemiskinan secara umum dibedakan atas kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut didasarkan pada ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Konsep ini dikembangkan di Indonesia dan dinyatakan sebagai “*inability of the individual to meet basic needs*” (Tjondronegoro, Soejono dan Hardjono, 1993). Konsep tersebut sejalan dengan Amartya Sen (Meier, 1989) yang menyatakan bahwa kemiskinan adalah “*the failure to have certain minimum capabilities*”. Definisi tersebut mengacu pada standar kemampuan minimum tertentu, yang berarti bahwa penduduk yang tidak mampu mencukupi kebutuhan minimum tersebut dapat dianggap sebagai miskin.

Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat hidup secara layak. Nilai standar kebutuhan minimum tersebut digunakan sebagai garis pembatas untuk memisahkan antara penduduk miskin dan tidak miskin. Uppal (1985) menyebutkan garis pembatas tersebut sebagai garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*).

Garis kemiskinan sesungguhnya merupakan sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan minimum non-makanan yang mendasar, seperti perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan aneka barang dan jasa lainnya. Biaya untuk membayar 2.100 kilo kalori per kapita per hari disebut sebagai *Garis Kemiskinan Makanan (GKM)* dan biaya untuk membayar kebutuhan minimum non makanan mendasar disebut sebagai *Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM)*. Individu dengan pengeluaran lebih rendah dari Garis Kemiskinan disebut sebagai penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan atau penduduk miskin. Persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan merupakan indikator kemiskinan yang sering digunakan dan biasa disebut *Head Count Index (HCI)*.

2.7. Indeks Williamson

Jeffrey G Williamson merupakan ekonom Wisconsin yang banyak meneliti tentang kebijakan publik. Salah satu temuan besarnya adalah indeks kesenjangan antar wilayah yang selanjutnya dikenal dengan Indeks Williamson. Indeks tersebut pada dasarnya membandingkan antar besaran ekonomi wilayah dengan besaran rata-rata di wilayah yang lebih luas (wilayah induk). Adapun model yang digunakan untuk menyusun indeks tersebut adalah sebagai berikut:

$$WI = \frac{1}{Y} \sqrt{\frac{2}{n} \left[\sum (Y_i - Y)^2 \cdot \left(\frac{f_i}{n} \right) \right]} \quad \dots\dots\dots(2.10)$$

Keterangan:

WI : Nilai Indeks *Williamson* dari variable yang dimasukkan.

Y_i : Nilai dari variable yang dimasukkan masing-masing daerah i

Y : Nilai dari variable yang dimasukkan untuk cakupan wilayah yang membawahi daerah i.

f_i : Jumlah penduduk masing-masing daerah i

n : jumlah penduduk keseluruhan wilayah yang membawahi daerah i.

Dari indeks tersebut, maka dapat diketahui bagaimana posisi satu wilayah, relatif terhadap wilayah induknya. Semakin tinggi angka WI maka tingkat kesenjangan semakin tinggi.

2.8. Indeks Gini

Untuk melihat ketimpangan pendapatan penduduk, salah satu indikator yang sering dipakai adalah Rasio Gini. Ide dasar perhitungan Rasio Gini sebenarnya berasal dari upaya pengukuran luas suatu kurva (selanjutnya disebut **Kurva Lorenz**) yang menggambarkan distribusi pendapatan untuk seluruh kelompok pengeluaran. Secara ilustrasi, luas kurva Lorenz merupakan luas daerah di bawah garis diagonal yang dibatasi dengan kurva pada suatu persegi empat. Perbandingan antara luas daerah Kurva Lorenz dengan luas daerah di bawah garis diagonal dapat diperoleh nilai Rasio Gini. Secara matematis, untuk menghitung Rasio Gini dapat menggunakan persamaan berikut :

$$Rasio\ Gini = 1 - \sum_{i=1}^k \frac{P_i(Q_i + Q_{i-1})}{10.000} \quad \dots\dots\dots(2.11)$$

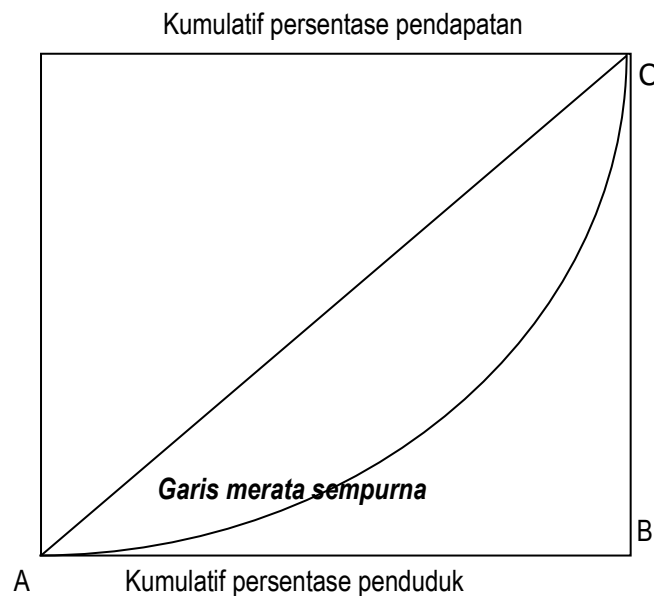
Keterangan:

P_i = Persentase penduduk pada kelas pengeluaran ke-i

Q_i = Persentase kumulatif jumlah pengeluaran pada kelas pengeluaran ke-i

k = Jumlah kelas pengeluaran yang dibentuk.

Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin **mendekati 1** maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati **ketimpangan sempurna**. Sebaliknya, semakin **mendekati 0** distribusi pendapatan penduduk semakin merata, atau mendekati **pemerataan sempurna**. Menurut **Harry T. Oshima**, nilai Rasio Gini dibagi menjadi tiga tingkatan. Jika nilai Rasio Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “**rendah**”; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “**moderat**”; dan jika nilainya **lebih besar dari 0,5** dikatakan berada dalam ketimpangan “**tinggi**”.



Gambar 2.2: Kurva Lorenz

Gini Ratio = Luas Bidang A / Segi tiga ABC.

BAB III METODOLOGI

3.1. Menganalisis Kondisi Ekonomi DIY 2011-2015

Analisis kondisi ekonomi DIY mencakup pertumbuhan ekonomi dan sumber-sumber pendapatan daerah yang dianalisis secara deskriptif. Melalui analisis ini diharapkan dapat diketahui perkembangan capaian pertumbuhan ekonomi DIY sehingga dapat digunakan sebagai pijakan untuk kebijakan tahun-tahun selanjutnya.

Adapun data yang digunakan adalah data empiris makro ekonomi DIY dari tahun 2008-2015. Jenis data adalah data sekunder yang diperoleh dari RPJMD DIY tahun 2012-2017 dan BPS (Badan Pusat Statistik) Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.2. Proyeksi Indikator Ekonomi DIY 2016-2020

Proyeksi indikator ekonomi 2016-2020 meliputi Nilai PDRB, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, ICOR, Ketenagakerjaan, Kemiskinan, IW, Indeks Gini. Proyeksi indikator ekonomi dihasilkan dengan menggunakan metode *semi average*.

Data yang digunakan adalah data tahun sebelumnya dari tahun 2008-2015 untuk analisis asumsi yang digunakan yakni mencakup nilai PDRB, laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, ICOR, ketenagakerjaan, kemiskinan, Indeks Williamson, Indeks Gini. Jenis data adalah data sekunder yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.3. Menyusun Perubahan Asumsi Ekonomi Makro tahun 2014/2015 dan tahun 2015/2016

Perubahan asumsi makro tahun 2014/2015 dan tahun 2015/2016 DIY dapat disusun berdasarkan analisis perbandingan target pertumbuhan ekonomi DIY dengan analisis makro ekonomi DIY tahun 2014/2015 dan 2015/2016. Penyesuaian tersebut perlu dilakukan agar target-target ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintah daerah lebih realitis dengan berpijak pada kondisi riilnya.

3.4. Menyusun Skema Pencapaian Target Pertumbuhan Ekonomi

Target pertumbuhan ekonomi provinsi dan kabupaten/kota di DIY yang sesuai dengan target di RPJMD 2012-2017 dapat dipenuhi dengan menghitung proyeksi PDRB-nya. Nilai PDRB provinsi dan kabupaten/kota di DIY untuk tahun 2016-2020 kemudian dihitung proyeksinya untuk setiap lapangan usaha/sektor berdasarkan *share* (kontribusi) masing-masing lapangan usaha/sektor agar dapat mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan RPJMD DIY tahun 2012-2017.

Adapun data yang digunakan adalah data empiris PDRB total dan PDRB ADHK 2010 untuk setiap lapangan usaha/sektor baik provinsi ataupun kabupaten/kota di DIY dari tahun 2011-2015. Jenis data adalah data sekunder yang diperoleh dari RPJMD DIY tahun 2012-2017 dan BPS (Badan Pusat Statistik) Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB IV HASIL PROYEKSI DAN ANALISIS

4.1. Kondisi Ekonomi di DIY 2011-2015

4.1.1. Pertumbuhan Ekonomi DIY

Kinerja ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dilihat dari nilai PDRB harga konstan tahun 2010 pada tahun 2011 hingga tahun 2015 cenderung mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB atas harga konstan tahun 2010. Pada tahun 2011 nilai PDRB sebesar 68.049 triliun rupiah mengalami kenaikan menjadi 71.702 triliun rupiah pada tahun 2012 dan terus mengalami kenaikan hingga 83.461 triliun rupiah pada tahun 2015.

Sedangkan dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya, DIY mengalami pasang surut. Pada tahun 2011 hingga 2013 laju pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan sebesar 5,2 persen pada tahun 2011 menjadi 5,4 persen di tahun 2012 dan menjadi 5,5 persen di tahun 2013. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2013 disebabkan oleh meningkatnya sektor pembentuk PDRB DIY, semua sektor tersebut mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 laju pertumbuhan ekonomi DIY mengalami penurunan sebesar 5,20 persen dan pada tahun 2015 menurun menjadi 4,94 persen. Melambatnya pertumbuhan ekonomi DIY terjadi seiring dengan melambatnya ekonomi nasional. Hampir semua sektor pertumbuhan ekonomi DIY mengalami penurunan kecuali sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan; Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor; serta jasa lainnya.

Berdasarkan laporan Bank Indonesia meningkatnya pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di dukung oleh keberhasilan kebijakan pemerintah dalam mendorong tercapainya ketahanan pangan. Sektor perdagangan juga mengalami peningkatan akibat dari tingginya permintaan pada saat perayaan hari raya Idul Fitri dan libur sekolah. Pelarangan penyelenggaraan *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE) di hotel untuk aparatur negara berdampak pada penurunan okupansi hotel khususnya hotel berbintang. Turunnya daya beli wisatawan juga mendorong perlambatan sektor Akomodasi dan makanan minuman.

Bab IV Hasil Proyeksi dan Analisis

**Tabel 4.1. Perkembangan Nilai PDRB DIY ADHK 2010
Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 (juta rupiah)**

Kategori	Uraian		2011	2012	2013	2104	2015
-1	-2		-3	-4	-5	-6	-7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		7.134.678,9	7.500.728,2	7.670.026,2	7.508.980,3	7.703.978,1
	1	Pertanian Peternakan Perburuan dan Jasa Pertanian	6.241.690,4	6.588.236,9	6.741.414,9	6.539.528,2	6,703,079.0
		a, Tanaman Pangan	2.682.412,3	2.796.754,6	2.808.220,7	2.760.023,5	2,874,734.0
		b, Tanaman Hortikultura Semusim	230.586,3	232.437,3	235.350,9	212.590,9	220,477.6
		c, Perkebunan Semusim	38.602,2	40.373,5	41.348,4	41.666,1	40,253.7
		d, Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	1.627.461,2	1.828.045,6	1.942.962,6	1.731.959,8	1,709,503.9
		e, Perkebunan Tahunan	155.231,3	158.001,3	166.790,4	167.480,0	160,968.8
		f, Peternakan	1.374.982,1	1.397.691,3	1.409.959,7	1.478.301,7	1,548,209.3
		g, Jasa Pertanian dan Perburuan	132.415,0	134.933,3	136.782,1	147.506,3	148,931.6
	2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	651.122,1	654.157,9	657.699,9	680.932,8	700,236.9
	3	Perikanan	241.866,5	258.333,4	270.911,3	288.519,3	300,662.1
B	Pertambangan dan Penggalian		436.328,7	443.626,9	461.013,8	470.734,6	471.323,2
	1	Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	-	-	-	-	0.0

Bab IV Hasil Proyeksi dan Analisis

	2	Pertambangan Batubara dan Lignit	-	-	-	-	0.0
	3	Pertambangan Bijih Logam	-	-	-	-	0.0
	4	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	436.328,7	443.626,9	461.013,8	470.734,6	471,323.2
C	Industri Pengolahan		9.711.791,7	9.435.888,0	10.084.213,3	10.469.636,9	10.652.525,1
	1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-	-	0.0
		a, Industri Batu Bara					
		b, Industri Pengilangan Migas					
	2	Industri Makanan dan Minuman	4.995.562,6	4.701.531,3	5.141.145,2	5.550.764,0	5,724,930.3
	3	Pengolahan Tembakau	568.517,4	567.358,2	571.755,5	456.644,9	412,954.8
	4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	891.754,1	896.425,4	982.801,6	1.059.015,3	1,122,114.4
	5	Industri Kulit Barang dari Kulit dan Alas Kaki	252.031,5	263.351,8	279.763,8	279.526,2	300,273.3
	6	Industri Kayu Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu Rotan dan Sejenisnya	182.528,6	184.474,5	193.358,3	190.504,2	186,322.4
	7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	240.487,4	234.555,6	238.009,9	248.636,7	253,685.7
	8	Industri Kimia Farmasi dan Obat Tradisional	114.308,1	117.627,1	117.513,9	125.873,3	135,404.1
	9	Industri Karet Barang dari Karet dan Plastik	295.008,4	311.558,1	310.988,6	292.300,2	265,704.0
	10	Industri Barang Galian bukan Logam	325.560,6	322.467,1	353.713,2	359.128,1	335,701.7
	11	Industri Logam Dasar	-	-	-	-	0.0

Bab IV Hasil Proyeksi dan Analisis

	12	Industri Barang dari Logam Komputer Barang Elektronik Optik dan Peralatan Listrik	754.828,3	734.753,7	769.924,8	788.641,2	777,412.5
	13	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	371.725,1	377.954,7	375.320,8	403.331,4	430,750.2
	14	Industri Alat Angkutan	3.073,8	3.205,9	3.139,4	2.831,6	2,631.5
	15	Industri Furnitur	483.901,2	476.249,7	488.110,6	466.972,4	453,940.5
	16	Industri pengolahan lainnya jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	232.504,7	244.375,0	258.667,7	245.467,5	250,699.7
D	Pengadaan Listrik, Gas		100.058,9	110.269,8	116.969,2	121.267,5	119.663,1
	1	Ketenagalistrikan	99.367,3	109.542,9	116.199,0	120.467,7	118,854.5
	2	Gas	691,7	727,0	770,2	799,8	808.7
E	Pengadaan Air		76.349,5	78.992,2	79.739,9	82.855,4	85.260,2
F	Konstruksi		6.483.267,4	6.772.475,9	7.106.854,7	7.508.543,3	7.826.700,7
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		5.410.096,5	5.878.431,7	6.187.855,1	6.540.107,5	6.944.902,7
	1	Perdagangan Mobil Sepeda Motor dan Reparasinya	845.696,8	926.345,2	983.772,5	1.058.936,0	1,091,042.1
	2	Perdagangan Besar dan Eceran	4.564.399,7	4.952.086,6	5.204.082,6	5.481.171,5	5,853,860.6

Bab IV Hasil Proyeksi dan Analisis

H	Transportasi dan Pergudangan		3.795.544,7	3.975.070,5	4.217.506,9	4.377.849,8	4.541.309,5
	1	Angkutan Rel	50.532,4	51.558,8	50.999,1	60.546,0	65,371.0
	2	Angkutan Darat	2.604.724,2	2.647.243,4	2.761.816,0	2.810.248,9	2,902,683.0
	3	Angkutan Laut	-	-	-	-	0.0
	4	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	-	-	-	-	0.0
	5	Angkutan Udara	437.198,4	515.711,0	597.096,7	631.120,0	650,042.7
	6	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan Pos dan Kurir	703.089,7	760.557,3	807.595,1	875.934,9	923,212.8
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		6.066.531,9	6.480.399,2	6.942.541,1	7.414.021,0	7.842.132,3
	1	Penyediaan Akomodasi	1.063.072,9	1.188.626,5	1.289.746,6	1.353.394,3	1,450,425.0
	2	Penyediaan Makan Minum	5.003.459,0	5.291.772,7	5.652.794,5	6.060.626,6	6,391,707.2
J	Informasi dan Komunikasi		6.775.394,2	7.503.157,6	7.969.970,4	8.458.713,2	8.891.144,9
K	Jasa Keuangan		2.268.272,6	2.341.597,7	2.610.919,1	2.826.933,5	3.060.732,9
	1	Bank	1.608.303,6	1.652.024,1	1.898.021,7	2.086.228,9	2,273,369.4
	2	Asuransi dan Dana Pensiun	214.927,5	220.367,8	224.469,4	237.670,3	247,199.4
	3	Jasa Keuangan Lainnya	439.239,6	463.429,6	482.676,8	496.979,2	533,921.7
	4	Jasa Penunjang Keuangan	5.802,0	5.776,2	5.751,3	6.055,1	6,242.4
L	Real Estate						

Bab IV Hasil Proyeksi dan Analisis

		4.699.363,4	5.116.888,2	5.322.003,8	5.735.457,1	6.105.125,6
M,N	Jasa Perusahaan	769.963,3	831.517,1	858.734,2	924.041,7	991.563,8
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.999.227,1	5.373.904,2	5.639.411,8	5.971.985,6	6.281.580,3
P	Jasa Pendidikan	5.841.702,3	6.148.737,3	6.430.385,5	6.938.845,3	7.444.276,5
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.640.479,0	1.791.076,0	1.916.373,7	2.062.978,6	2.210.405,6
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.840.824,2	1.919.688,6	2.012.930,9	2.119.325,9	2.288.950,1
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	68.049.874,4	71.702.449,2	75.627.449,6	79.532.277,4	83.461.574,5

Sumber: BPS

Bab IV Hasil Proyeksi dan Analisis

Seriring pertumbuhan ekonomi nasional yang melambat, pertumbuhan ekonomi DIY mengalami penurunan dari 5,2 persen pada tahun 2014 dan menjadi sebesar 4,94 persen pada tahun 2015. Penurunan pertumbuhan ekonomi DIY per sektor (lapangan usaha) dapat dilihat pada tabel 4.2. Secara umum hampir semua sektor mengalami penurunan ekonomi kecuali sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan; perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor; serta jasa lainnya. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian DIY disebabkan oleh kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah seperti perbaikan jaringan, perbaikan infrastruktur pertanian, bantuan bibit unggul dan alat pertanian hingga kerja sama dengan berbagai pihak yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan.

**Tabel 4.2. Perkembangan Pertumbuhan PDRB
Menurut Lapangan Usaha DIY ADHK 2010, 2011-2015 (%)**

Kategori	Uraian		2011	2012	2013	2104	2015
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		-1,6	5,1	2,3	-2,1	2,60
	1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	-1,9	5,6	2,3	-3,0	2.50
		a, Tanaman Pangan	-3,0	4,3	0,4	-1,7	4.16
		b, Tanaman Hortikultura Semusim	4,9	0,8	1,3	-9,7	3.71
		c, Perkebunan Semusim	5,5	4,6	2,4	0,8	-3.39
		d, Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	-5,7	12,3	6,3	-10,9	-1.30
		e, Perkebunan Tahunan	1,8	1,8	5,6	0,4	-3.89
		f, Peternakan	3,2	1,7	0,9	4,8	4.73
		g, Jasa Pertanian dan Perburuan	1,4	1,9	1,4	7,8	0.97
	2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,3	0,5	0,5	3,5	2.83
	3	Perikanan	0,3	6,8	4,9	6,5	4.21
B	Pertambangan dan Penggalian		7,3	1,7	3,9	2,1	0,13
	1	Pertambangan Minyak dan Gas Bumi					
	2	Pertambangan Batubara dan Lignit					
	3	Pertambangan Bijih Logam					
	4	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	7,3	1,7	3,9	2,1	0.13
C	Industri Pengolahan		5,4	-2,8	6,9	3,8	1,75
	1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas					
		a, Industri Batu Bara					
		b, Industri Pengilangan Migas					
	2	Industri Makanan dan Minuman	7,7	-5,9	9,4	8,0	3.14
	3	Pengolahan Tembakau	0,1	-0,2	0,8	-20,1	-9.57

Bab IV Hasil Proyeksi dan Analisis

	4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	5,8	0,5	9,6	7,8	5.96
	5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	5,2	4,5	6,2	-0,1	7.42
	6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	-8,5	1,1	4,8	-1,5	-2.20
	7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	-4,6	-2,5	1,5	4,5	2.03
	8	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	6,2	2,9	-0,1	7,1	7.57
	9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	2,6	5,6	-0,2	-6,0	-9.10
	10	Industri Barang Galian bukan Logam	6,8	-1,0	9,7	1,5	-6.52
	11	Industri Logam Dasar					
	12	Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	9,6	-2,7	4,8	2,4	-1.42
	13	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	4,1	1,7	-0,7	7,5	6.80
	14	Industri Alat Angkutan	-1,8	4,3	-2,1	-9,8	-7.07
	15	Industri Furnitur	-2,4	-1,6	2,5	-4,3	-2.79
	16	Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	1,1	5,1	5,8	-5,1	2.13
D	Pengadaan Listrik, Gas		5,6	10,2	6,1	3,7	-1,32
	1	Ketenagalistrikan	5,6	10,2	6,1	3,7	-1.34
	2	Gas	4,9	5,1	6,0	3,8	1.11
E	Pengadaan Air		0,3	3,5	0,9	3,9	2,90
F	Konstruksi		4,8	4,5	4,9	5,7	4,24
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		5,1	8,7	5,3	5,7	6,19
	1	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	2,5	9,5	6,2	7,6	3.03
	2	Perdagangan Besar dan Eceran	5,6	8,5	5,1	5,3	6.80
H	Transportasi dan Pergudangan		3,9	4,7	6,1	3,8	3,73
	1	Angkutan Rel	-25,8	2,0	-1,1	18,7	7.97
	2	Angkutan Darat	2,4	1,6	4,3	1,8	3.29
	3	Angkutan Laut					
	4	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan					
	5	Angkutan Udara	16,1	18,0	15,8	5,7	3.00
	6	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	5,9	8,2	6,2	8,5	5.40
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		5,7	6,8	7,1	6,8	5,77
	1	Penyediaan Akomodasi	9,3	11,8	8,5	4,9	7.17
	2	Penyediaan Makan Minum	4,9	5,8	6,8	7,2	5.46

Bab IV Hasil Proyeksi dan Analisis

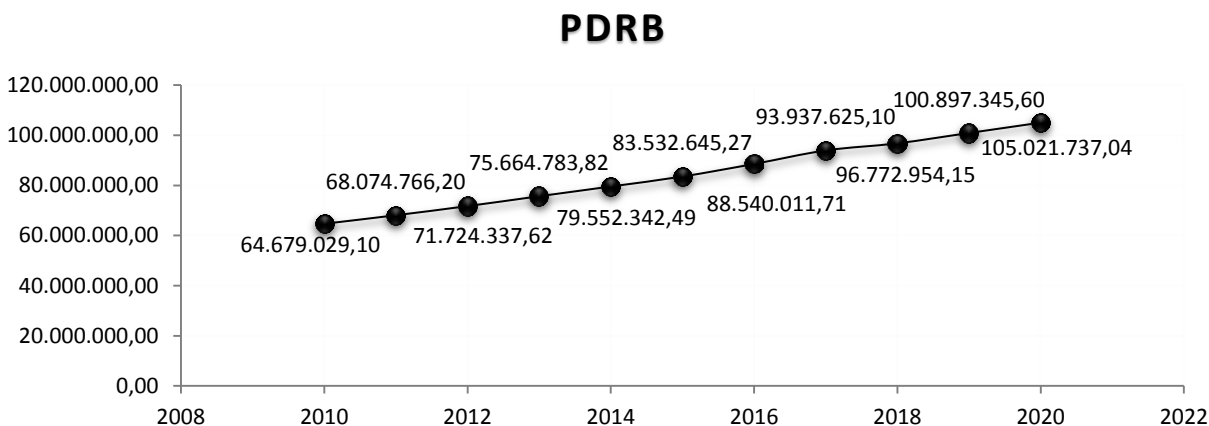
J	Informasi dan Komunikasi	9,6	10,7	6,2	6,1	5,11
K	Jasa Keuangan	11,3	3,2	11,5	8,3	8,27
	1 Bank	11,5	2,7	14,9	9,9	8.97
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	9,4	2,5	1,9	5,9	4.01
	3 Jasa Keuangan Lainnya	11,7	5,5	4,2	3,0	7.43
	4 Jasa Penunjang Keuangan	7,9	-0,4	-0,4	5,3	3.09
L	Real Estate	4,5	8,9	4,0	7,8	6,45
M,N	Jasa Perusahaan	6,6	8,0	3,3	7,6	7,31
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,6	7,5	4,9	5,9	5,18
P	Jasa Pendidikan	7,6	5,3	4,6	7,9	7,28
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,5	9,2	7,0	7,7	7,15
R,S,T,U	Jasa lainnya	6,8	4,3	4,9	5,3	8,00
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,2	5,4	5,5	5,2	4,94

Sumber: BPS Provinsi DIY

Menurunnya pertumbuhan ekonomi DIY diberbagai sektor juga disebabkan oleh beberapa kebijakan pemerintah seperti pelarangan aparaturn pemerintah untuk menggunakan hotel sebagai tempat *meeting* berdampak pada berkurangnya okupansi hotel. Di samping itu, perlambatan permintaan domestik juga terjadi dan menyebabkan industri pengolahan mengalami penurunan dibanding tahun 2014. Bank Indonesia melaporkan penurunan ini disebabkan tekanan nilai tukar. Karena nilai tukar menyebabkan peningkatan harga bahan baku untuk sejumlah industri terutama tekstil sehingga meningkatkan biaya produksi.

4.2 Proyeksi Indikator Ekonomi DIY 2016-2020

4.2.1. PDRB



Grafik 4.1. PDRB ADHK 2010 DIY Tahun 2010-2020 (juta rupiah)

Bab IV Hasil Proyeksi dan Analisis

Grafik di atas menunjukkan PDRB ADHK 2010 tahun 2010-2015 dan proyeksi PDRB ADHK 2010 tahun 2016-2020. Perkembangan nilai PDRB ADHK 2010 DIY dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, peningkatan ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah gencarnya pembangunan (investasi) yang dilakukan di wilayah DIY. Diharapkan pembangunan ini terus dilakukan untuk dapat meningkatkan PDRB DIY.

**Tabel 4.3. Proyeksi Nilai PDRB ADHK 2010Kabupaten/Kota DIY
Tahun 2016-2020
(juta rupiah)**

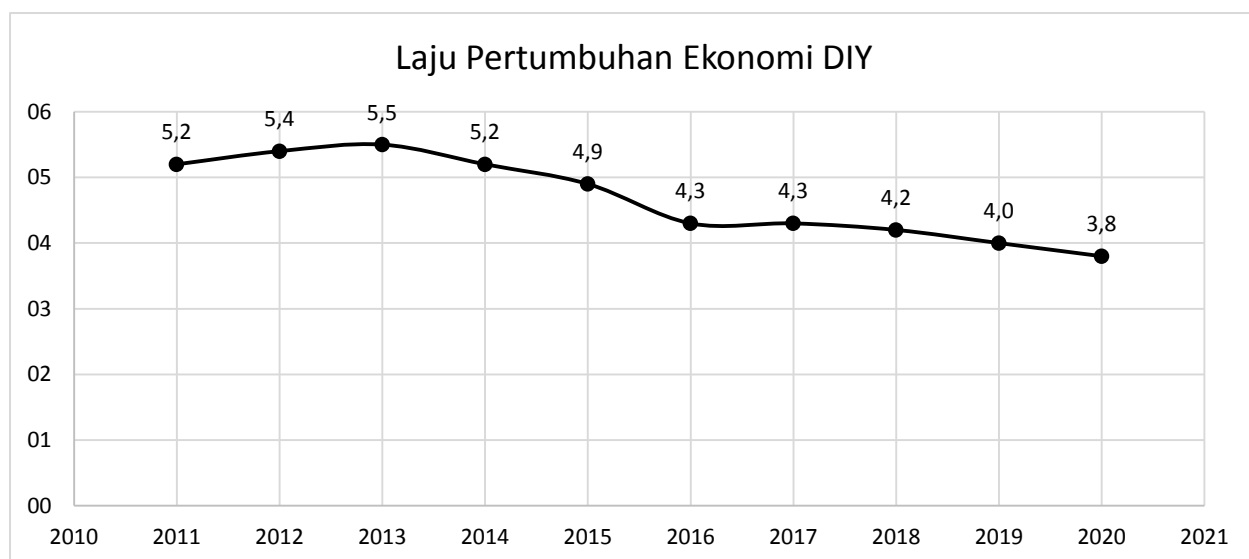
TAHUN	2016		2017		2018		2019		2020	
PDRB	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat
KP	6.557.624	5.573.980	6.916.327	5.878.878	7.089.157	6.025.784	7.353.831	6.250.756	7.618.504	6.475.729
BANTUL	16.587.424	14.099.310	17.615.844	14.973.468	18.128.181	15.408.954	18.904.289	16.068.646	19.680.398	16.728.338
GK	11.717.248	9.959.661	12.317.171	10.469.595	12.697.263	10.792.674	13.191.054	11.212.396	13.684.845	11.632.119
SLEMAN	29.898.088	25.413.375	31.736.821	26.976.298	32.790.428	27.871.864	34.243.746	29.107.184	35.697.064	30.342.504
KOTA YOGYAKARTA	23.779.628	20.212.684	25.351.462	21.548.743	26.067.925	22.157.736	27.204.425	23.123.762	28.340.926	24.089.787

Sumber: BPS, diolah

Bab IV Hasil Proyeksi dan Analisis

Nilai proyeksi PDRB Kabupaten/Kota tahun 2016 hingga 2020 mengalami peningkatan. Kabupaten Sleman memiliki PDRB tertinggi di antara lima Kabupaten/Kota di DIY. Kenaikan PDRB Kabupaten/Kota ini disebabkan berbagai faktor, salah faktor yang dapat mempengaruhi kenaikan PDRB adalah pembangunan yang dilakukan di wilayah tersebut. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki dampak pada peningkatan investasi.

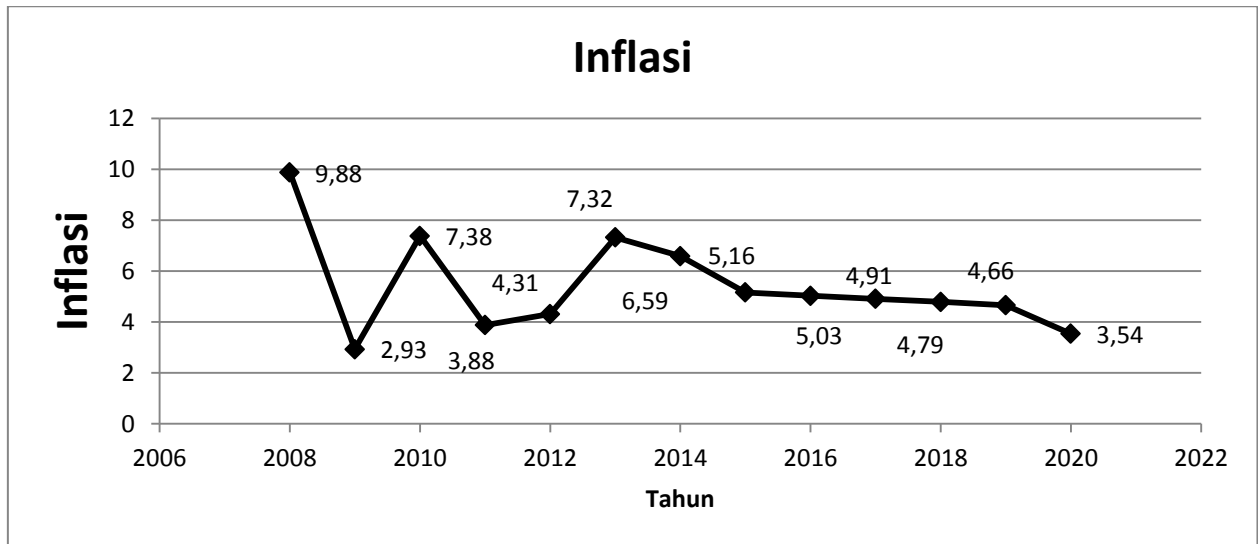
4.2.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi



Grafik 4.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2011-2020 (%)

Grafik 4.2 di atas menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2011-2015 dan proyeksi pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2016-2020. Pertumbuhan ekonomi DIY dari tahun 2011-2020 secara umum menunjukkan kecenderungan menurun. Penurunan laju pertumbuhan ekonomi ini seiring dengan perlambatan ekonomi nasional. Melemahnya ekonomi DIY disebabkan lemahnya konsumsi rumah tangga dan investasi.

4.2.3. Inflasi



Grafik 4.3. Inflasi DIY Tahun 2008-2020

Grafik di atas menunjukkan Inflasi tahun 2008-2014 dan proyeksi inflasi tahun 2015-2020 menunjukkan tren penurunan. Tim pengendalian inflasi DIY sudah cukup efektif dalam menekan tingkat inflasi sehingga tingkat inflasi di DIY cenderung terjaga pada level yang relatif rendah. Untuk inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 9,88 persen dan terendah terjadi di tahun 2009 dengan tingkat inflasi hanya sebesar 2,93 persen. Tetapi dengan semakin majunya perekonomian DIY maka kecenderungan terjadinya inflasi akan semakin besar, oleh karenanya inflasi masih harus terus dikendalikan karena jika inflasi tidak dikendalikan maka akan dapat berdampak pada penurunan daya beli masyarakat.

**Tabel 4.4. Proyeksi Inflasi DIY
Tahun 2015-2020**

TAHUN	2015		2016		2017	
	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat
INFLASI	5,16	5,19	5,03	5,06	4,91	4,93
TAHUN	2018		2019		2020	
	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat
INFLASI	4,79	4,81	4,66	4,68	3,54	3,56

Sumber: BPS, diolah

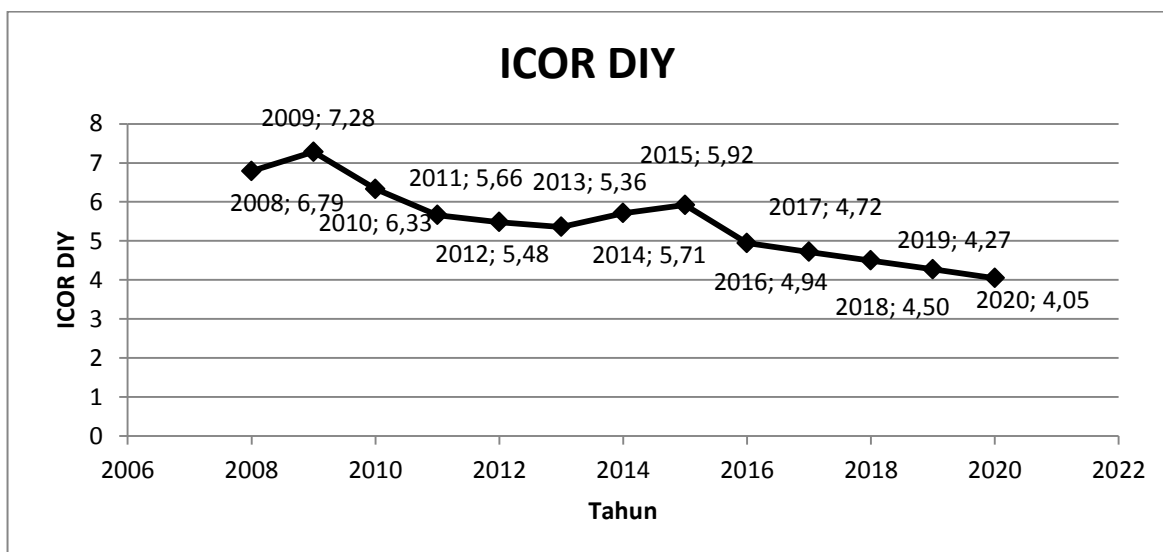
Proyeksi inflasi DIY mengalami penurunan dari 5,16 pada tahun 2015 menjadi 5,03 pada tahun 2016 dan pada akhir tahun 2020 menjadi 3,54 persen.

Bab IV Hasil Proyeksi dan Analisis

Faktor pertumbuhan ekonomi dan tingkat suku bunga BI merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat inflasi di DIY. Ketika pertumbuhan ekonomi terjadi maka pendapatan masyarakat cenderung naik dan kegiatan ekonomi juga akan semakin besar. Kondisi tersebut akan mempengaruhi kegiatan ekonomi riil, perdagangan serta kegiatan di sektor moneter. Ketika suku bunga BI naik maka masyarakat cenderung untuk menginvestasikan dananya pada tabungan sehingga akan mengurangi Jumlah Uang Beredar (JUB) dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat inflasi. Tetapi jika terjadi sebaliknya tingkat bunga terlalu rendah sehingga orang cenderung membelanjakan uang yang dimilikinya maka hal ini akan dapat mendorong terjadi inflasi. Oleh karena kebijakan moneter yang tepat oleh BI menjadi sangat penting dalam pengendalian tingkat inflasi, dan selama ini hal itu telah dijalankan dengan baik oleh BI.

Di samping itu keberhasilan pengendalian harga sembilan bahan pokok juga akan dapat mempengaruhi tingkat inflasi di DIY. Pengendalian harga bahan pokok khususnya kelancaran *supply* dan distribusinya perlu diperhatikan karena iklim yang kurang mendukung dan kondisi jalan yang kurang baik akan kurang dapat menjamin kestabilan harga sembilan bahan pokok di DIY.

4.2.4. ICOR



Grafik 4.4. ICOR DIY Tahun 2008-2020

Bab IV Hasil Proyeksi dan Analisis

Grafik di atas menunjukkan ICOR tahun 2008-2015 dan proyeksi ICOR tahun 2016-2020. Dari grafik di atas terlihat ICOR mengalami penurunan, hal ini mengindikasikan terjadi efisiensi dalam penggunaan investasi untuk menghasilkan output di DIY. Meskipun terjadi kenaikan pada tahun 2009 sebesar 7,28, tapi secara keseluruhan nilai ICOR DIY cenderung mengalami penurunan. Artinya dari tahun ke tahun kenaikan investasi di DIY telah membawa pertumbuhan output dengan lebih produktif.

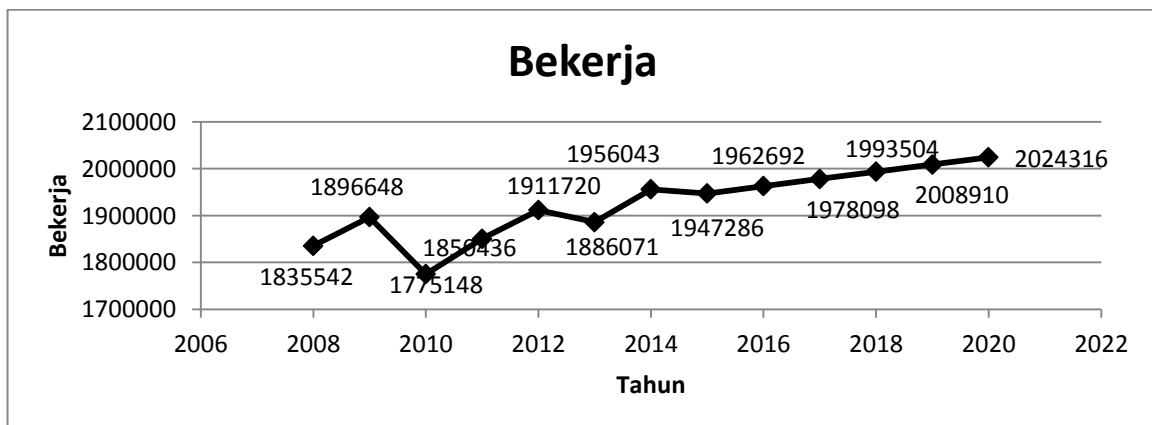
**Tabel 4.5. Proyeksi ICOR DIY
Tahun 2015-2020**

TAHUN	2016		2017		2018		2019		2020	
	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat
ICOR	4,94	5,69	4,72	5,43	4,50	5,17	4,27	4,91	4,05	4,65

Sumber: BPS, diolah

Proyeksi ICOR DIY untuk tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami penurunan, ICOR sebesar 4,94 diproyeksikan terjadi di tahun 2016 dan menjadi hanya sebesar 4,05 di tahun 2020. Penurunan angka ICOR ini menunjukkan bahwa terjadi efisiensi dalam penggunaan investasi untuk menghasilkan output di DIY. Hal ini menunjukkan juga bahwa ketika ICOR rendah maka dengan investasi yang sama akan dapat menghasilkan output yang lebih besar sehingga nilai PDRB akan dapat naik. Jika nilai PDRB naik maka dapat mendorong terjadinya laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Faktor-faktor lain akan dapat menentukan ICOR antara lain adalah besarnya penambahan Investasi dan komposisi atau alokasi investasi menurut sektor produksi yang tepat.

4.2.5. Ketenagakerjaan

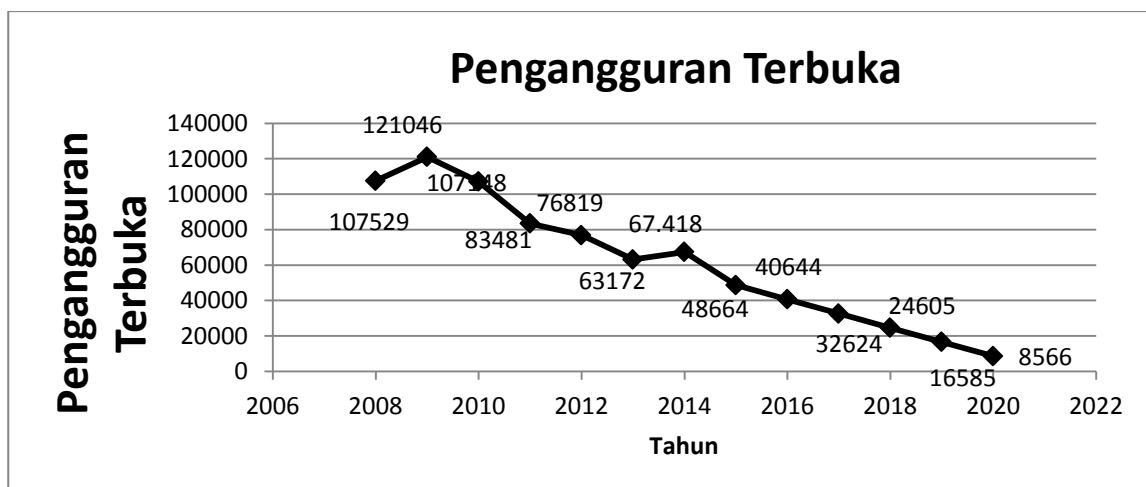


Grafik 4.5. Bekerja DIY Tahun 2008-2020

Bab IV Hasil Proyeksi dan Analisis

Dari Grafik 4.5 di atas terlihat jumlah orang yang bekerja di DIY tahun 2008-2014 dan proyeksi orang yang bekerja tahun 2015-2020. Selama periode 2008-2014 jumlah orang yang bekerja di DIY cenderung fluktuatif. Tahun 2010 merupakan tahun dengan kemampuan menyerap orang bekerja terendah di DIY yaitu sebesar 1.775.148 orang, jauh di bawah tahun sebelumnya (2009) yang dapat menyerap orang bekerja sebanyak 1.896.648 orang. Tetapi mulai tahun 2011 kemampuan perekonomian DIY dalam menyerap tenaga kerja terus meningkat mulai dari angka 1.850.436 orang, kemudian meningkat cukup signifikan menjadi 1.911.720 orang di tahun 2012. Hal ini mengindikasikan bahwa selama tahun 2012 di DIY telah berhasil dibuka kesempatan kerja yang dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, khususnya di sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa.

Proyeksi jumlah orang bekerja di DIY hingga tahun 2020 sebesar 2.024.316 orang. Hasil proyeksi yang naik ini mengindikasikan harapan semakin majunya perekonomian DIY ke depan akan dapat semakin membuka kesempatan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja lebih besar lagi dari tahun ke tahun.



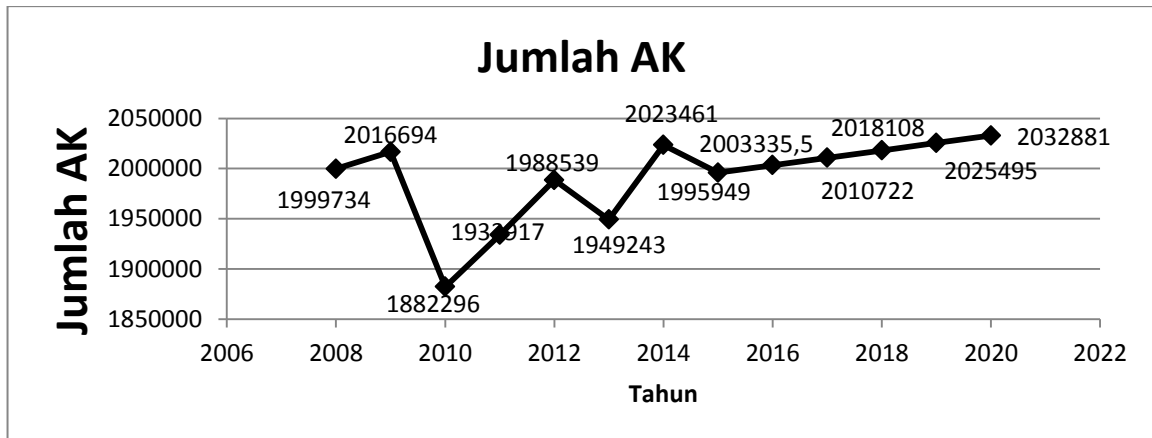
**Grafik 4.6. Pengangguran Terbuka DIY
Tahun 2008-2020**

Grafik 4.6. di atas menunjukkan pengangguran terbuka tahun 2008-2014 dan proyeksi pengangguran terbuka tahun 2015-2020. Untuk pengangguran terbuka di DIY selama 2008-2014 cenderung mengalami penurunan, meskipun pada tahun 2009 mengalami sedikit kenaikan di angka 121.046 orang dari angka 107.529 orang di tahun 2008. Tahun 2012 jumlah pengangguran terbuka di DIY juga

Bab IV Hasil Proyeksi dan Analisis

mengalami kenaikan yaitu dari 74.317 orang di tahun 2011 menjadi 92.561 orang di tahun 2012.

Tetapi untuk proyeksi pengangguran terbuka tahun 2015 sampai 2020 cenderung mengalami penurunan. Hal ini dapat terjadi bilamana kualitas pertumbuhan ekonomi di DIY dapat semakin baik dengan terbukanya kesempatan kerja yang lebih besar, penyediaan pekerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar serta tingkat upah yang terus membaik.



Grafik 4.7. Angkatan Kerja DIY Tahun 2008-2020

Grafik 4.7. di atas menunjukkan jumlah angkatan kerja di DIY tahun 2008-2014 dan proyeksi angkatan kerja tahun 2015-2020. Jumlah angkatan kerja terbesar terjadi di tahun 2009 sebanyak 2.016.694 orang, naik sekitar 0,84 persen dari tahun 2008 yang masih sebesar 1.999.734 orang. Tahun 2010 dan tahun 2011 angkatan kerja di DIY terus mengalami penurunan, dan baru naik kembali di tahun 2013.

Proyeksi untuk tahun 2015 hingga 2020 angkatan kerja di DIY terus mengalami kenaikan. Hal ini mengindikasikan juga kondisi di DIY akan terus membaik, baik dari sisi tingkat kesehatan, usia harapan hidup yang lebih panjang, kesempatan kerja yang semakin terbuka, dan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi maupun kesiapan calon pekerja masuk ke angkatan kerja.

Bab IV Hasil Proyeksi dan Analisis

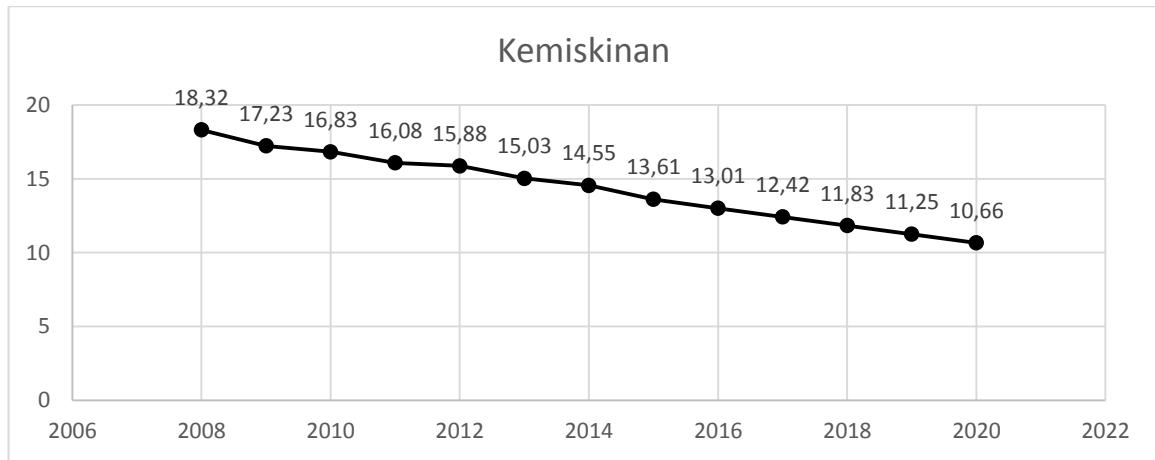
**Tabel 4.6. Proyeksi Ketenagakerjaan DIY
Tahun 2015-2020**

Tahun	2.015		2.016		2.017	
Indikator	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat
Bekerja	1.947.286	1.655.193	1.962.692	1.668.288	1.978.098	1.681.383
Pengangguran Terbuka	48.664	41.364	40.644	34.547	32.624	27.731
Jumlah Angkatan Kerja	1.995.950	1.696.557	2.003.336	1.702.835	2.010.722	1.709.114
Tahun	2.018		2.019		2.020	
Indikator	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat
Bekerja	1.993.504	1.694.478	2.008.910	1.707.573	2.024.316	1.720.668
Pengangguran Terbuka	24.605	20.914	16.585	14.097	8.566	7.281
Jumlah Angkatan Kerja	2.018.109	1.715.392	2.025.495	1.721.670	2.032.882	1.727.949

Sumber: BPS, diolah

Jumlah angkatan kerja terdiri dari orang yang bekerja dan pengangguran terbuka. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketenagakerjaan di DIY di antaranya adalah tingkat upah, jumlah penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pendidikan, dan elastisitas penyerapan tenaga kerja.

Tersedianya jumlah penduduk yang besar pada usia kerja dengan tingkat pendidikan yang baik yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja serta upah yang cukup dan didukung pertumbuhan ekonomi yang baik maka akan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja DIY, sehingga akan dapat membantu menurunkan tekanan permasalahan dari pengangguran di DIY. Proyeksi angkatan kerja dan bekerja tahun 2015 dan 2016 untuk DIY tersebut juga menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja dan orang yang bekerja sama-sama mengalami kenaikan, tetapi pengangguran terbuka mengalami penurunan. Ini menggambarkan adanya optimisme yang kuat pada kualitas laju pertumbuhan ekonomi DIY, khususnya kemampuan dalam menyerap tenaga kerja.

4.2.6. Kemiskinan

Grafik 4.8. Persentase Penduduk Miskin Terhadap Penduduk DIY Tahun 2008-2020

Grafik 4.8. di atas menunjukkan persentase penduduk miskin tahun 2008-2015 dan proyeksi persentase penduduk miskin tahun 2016-2020. Kemiskinan merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk yang dihitung melalui konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan garis kemiskinan untuk menghitung jumlah penduduk miskin. Jika pengeluaran seseorang di atas garis kemiskinan maka orang tersebut tidak termasuk miskin, sebaliknya jika seseorang pengeluarannya di bawah garis kemiskinan maka orang tersebut termasuk kelompok penduduk miskin. Garis kemiskinan tersusun dari dua komponen pengeluaran yaitu pengeluaran untuk makanan dan non makanan.

Dari Grafik di atas terlihat persentase penduduk miskin terhadap penduduk DIY selama periode 2008-2020 mengalami penurunan setiap tahunnya baik untuk riil maupun untuk proyeksi persentase penduduk miskin terhadap penduduk DIY. Hal ini mengindikasikan perubahan kondisi yang terus membaik di DIY, tetapi angka penurunan penduduk miskin tersebut dirasakan masih terlalu kecil jauh di bawah yang diharapkan DPRD DIY yaitu turun sekitar 2%/ tahunnya.

Bab IV Hasil Proyeksi dan Analisis

Tabel 4.7.
Proyeksi Persentase Penduduk Miskin Terhadap Penduduk DIY
Tahun 2016-2020

Tahun	2016		2017		2018		2019		2020	
Indikator	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat
Kemiskinan (%)	13,01	14,96	12,42	14,28	11,83	13,61	11,25	12,93	10,66	12,26

Sumber: BPS, diolah

Nilai proyeksi persentase penduduk miskin terhadap penduduk DIY untuk tahun 2016 hingga 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2016 persentase penduduk miskin terhadap penduduk DIY di proyeksikan sebesar 13,01 persen dan pada tahun 2020 menjadi 10,66 persen. Tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan yang semakin tinggi merupakan faktor penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan di suatu daerah.

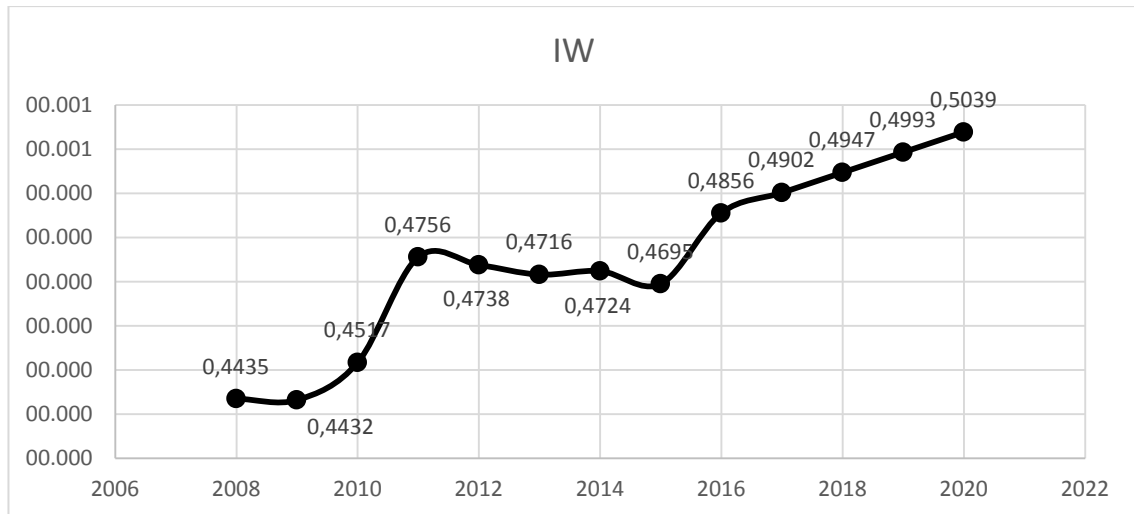
Faktor yang dapat mempengaruhi penurunan jumlah penduduk miskin adalah naiknya tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan dipengaruhi oleh tingkat upah atau gaji yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki pekerja. Semakin tinggi tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan keterampilan pekerja maka semakin baik daya belinya. Begitu pula semakin baiknya tingkat pendidikan yang dicapai penduduk maka akan meningkatkan tingkat kualitas tenaga kerja yang dihasilkan sehingga akan memberi peluang lebih besar memperoleh pekerjaan dengan upah atau gaji yang lebih tinggi. Dengan demikian semakin banyak orang yang memperoleh pekerjaan yang layak maka akan dapat meningkatkan tingkat pendapatannya dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup, yang pada akhirnya akan dapat mengurangi kemiskinan di DIY.

4.2.7. Indeks Williamson (IW)

Indeks Williamson merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesenjangan antar wilayah. Dari nilai IW DIY untuk tahun 2008-2020 cenderung mengalami peningkatan, meskipun angka IW-nya masih di bawah 0,5. Hal ini mengindikasikan bahwa di DIY kesenjangan antar wilayahnya semakin tinggi, dengan adanya kegiatan ekonomi yang semakin maju, meskipun kesenjangan tersebut masih tergolong rendah. Perhatian semua pihak untuk menselaraskan keberhasilan pembangunan yang didukung oleh laju pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi dengan pemerataan pembangunan dan hasilnya untuk

Bab IV Hasil Proyeksi dan Analisis

kabupaten/kota di DIY menjadi sangat penting. Untuk tahun 2016 proyeksi IW sebesar 0,4856 dan terus mengalami peningkatan hingga 0,5039 pada tahun 2020. Grafik di bawah ini menunjukkan IW tahun 2008-2015 dan proyeksi IW tahun 2016-2020.



**Grafik 4.9. IW DIY
Tahun 2008-2020**

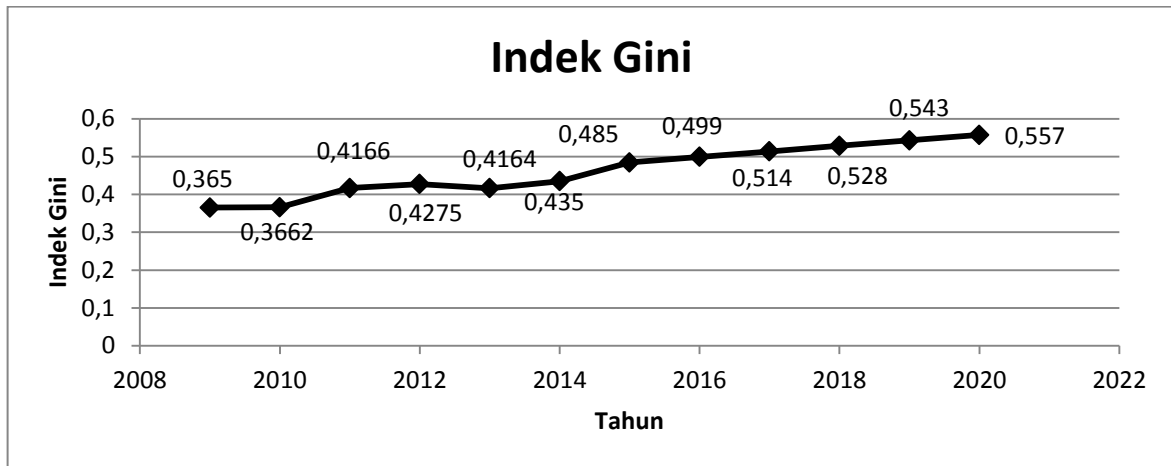
**Tabel 4.8. Proyeksi IW DIY
Tahun 2015-2020**

Tahun	2016		2017		2018		2019		2020	
Indikator	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat
IW	0,4856	0,558	0,4902	0,564	0,4947	0,569	0,4993	0,574	0,5039	0,579

Sumber: BPS, diolah

Hasil proyeksi Indeks Williamson (IW) DIY menunjukkan bahwa IW di DIY dari tahun 2016 hingga 2020 mengalami kenaikan, yaitu dari 0,4856 di tahun 2016 menjadi 0,5039 di tahun 2020. Kenaikan IW ini memiliki arti bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi DIY maka akan dapat berdampak pada terjadinya kesenjangan antar wilayahnya semakin tinggi. Namun indeks Williamson di DIY masih lebih kecil dari 0,5 yang berarti ketimpangan antar wilayah masih relatif kecil. Hal yang menyebabkan naiknya IW ini di antaranya adalah pertumbuhan penduduk kabupaten/kota di DIY yang semakin tinggi dan PDRB perkapita di kabupaten/kota di DIY yang tidak merata.

4.2.8. Indeks Gini (IG)



Grafik 4.10. Indeks Gini DIY Tahun 2008-2020

Grafik di atas menunjukkan IG di DIY tahun 2008-2014 dan proyeksi IG di DIY tahun 2015-2020. Indeks Gini (IG) berfungsi untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan di suatu daerah. Terdapat 3 (tiga) kategori tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yaitu ketika $IG < 0,3$ maka masuk ke dalam kategori ketimpangan rendah; $0,3 < IG < 0,5$ maka masuk kategori ketimpangan sedang dan $IG > 0,5$ maka masuk kategori ketimpangan tinggi.

Tabel 4.9. Proyeksi Indeks Gini DIY Tahun 2015-2020

Tahun	2015		2016		2017	
Indikator	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat
IG	0,485	0,557	0,499	0,574	0,514	0,591
Tahun	2018		2019		2020	
Indikator	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat
IG	0,528	0,608	0,543	0,624	0,557	0,641

Sumber: BPS, diolah

Melihat proyeksi Indeks Gini di DIY tahun 2015 yang berada di angka 0,485 maka hal ini mengindikasikan ketimpangan di DIY masih sedang. Demikian juga melihat proyeksi IG di DIY tahun 2016 yang sebesar 0,499, maka ketimpangan distribusi di DIY tahun 2016 juga masih masuk kategori sedang. Beberapa faktor yang dapat

mempengaruhi IG antara lain; pendapatan dan pengeluaran penduduk dan komposisi jumlah penduduk

4.3. Perubahan Asumsi Ekonomi Makro DIY tahun lalu (2014/2015) dan perkiraan tahun berjalan (2015/2016)

4.3.1. PDRB ADHK 2010

Tabel 4.10. PDRB ADHK 2010 DIY Tahun 2014/2015 dan 2015/2016

Tahun	2014/2015	2015/2016
Nilai		
Proyeksi (juta Rp)	n.a	n.a
Realisasi (juta Rp)	79.532.277	83.461.574
Perubahan (juta Rp)	-	-

Sumber: BPS

Pada tahun 2014, nilai PDRB ADHK 2010 sebesar 79.532.277 juta rupiah dan pada tahun 2015 sebesar 83.461.574 juta rupiah. Peningkatan nilai PDRB disebabkan oleh gencarnya pemerintah daerah memperbaiki berbagai infrastruktur daerah. Pembangunan hotel terutama di wilayah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta juga memberi andil terhadap peningkatan nilai PDRB DIY.

4.3.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 4.11. Laju Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2014/2015 dan 2015/2016

Tahun	2014/2015	2015/2016
Nilai		
Proyeksi (%)	5,68	5,83
Realisasi (%)	5,2	4,9
Perubahan (%)	-0,48	-0,93

Sumber: Penyusunan Makro Ekonomi Prov DIY 2014; BPS

Nilai proyeksi dan realisasi laju pertumbuhan ekonomi DIY pada tahun 2014 maupun 2015 terjadi perbedaan masing-masing sebesar 0,48 dan 0,93 persen. Nilai realisasi laju pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2014 dan 2015 lebih rendah dari nilai proyeksi, perbedaan ini terjadi karena menurunnya konsumsi rumah tangga dan investasi yang dilakukan oleh investor akibat dari penurunan kondisi pasar.

Bab IV Hasil Proyeksi dan Analisis

4.3.3. Inflasi

Tabel 4.12. Inflasi DIY Tahun 2014/2015 dan 2015/2016

Tahun \ Nilai	2014/2015	2015/2016
Proyeksi	6,88	7,45
Realisasi (%)	6,59	3,09
Perubahan (%)	-0,28	-4,36

Sumber: Penyusunan Makro Ekonomi Prov DIY 2014; BPS

Pada tahun 2014 realisasi inflasi DIY sebesar 6,59, nilai ini lebih rendah dibandingkan proyeksi yakni 6,88 persen. Untuk tahun 2015 inflasi sebesar 3,09 persen. Inflasi ini merupakan inflasi terendah sejak empat tahun terakhir.

Berdasarkan laporan BI, penurunan ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang secara serius mengendalikan inflasi di antaranya dengan menurunkan harga BBM pada 2015 dan faktor *base effect* akibat peningkatan harga BBM pada akhir tahun sebelumnya yang berdampak pada deflasi komponen *administered* dan ketersediaan beras secara nasional. Kebijakan yang dilakukan pemerintah di antaranya melalui kelonggaran impor serta gencarnya operasi pasar oleh Bulog. Hal itu di antaranya yang merupakan faktor yang menyebabkan penurunan inflasi *volatile food* pada akhir 2015.

4.3.4. ICOR

Tabel 4.13. ICOR DIY Tahun 2014/2015 dan 2015/2016

Tahun \ Nilai	2014/2015	2015/2016
Proyeksi	4,62	4,15
Realisasi	5,71	5,92
Perubahan	-1,11	-1,77

Sumber: Penyusunan Makro Ekonomi Prov DIY 2014;
Bappeda DIY Analisis ICOR 2013, BPS

ICOR DIY pada tahun 2014 dan 2015 lebih besar dibandingkan proyeksinya yakni sebesar 5,71 pada tahun 2014 dan 5,92 pada tahun 2015. Terjadi peningkatan nilai ICOR antara proyeksi dan realisasi. Hal ini kemungkinan karena nilai hasil pertanian yang cenderung menurun di beberapa daerah di DIY.

4.3.5. Bekerja

Tabel 4.14. Bekerja DIY Tahun 2014/2015 dan 2015/2016

Nilai \ Tahun	2014/2015	2015/2016
Proyeksi (orang)	1.869.643	1.881.271
Realisasi (orang)	1.956.043	n.a
Perubahan (orang)	86.400	-

Sumber: Penyusunan Makro Ekonomi Prov DIY 2014 dan BPS

Realisasi orang yang bekerja di DIY pada tahun 2014 lebih besar dibandingkan dengan proyeksinya, yaitu sebesar 86.400 orang. Realisasi penyerapan tenaga kerja meningkat pesat ini dapat terjadi dimungkinkan karena terjadinya peningkatan aktivitas pada sektor perdagangan besar dan eceran, jasa lainnya dan sektor pertanian yang menunjukkan peningkatan dibandingkan sektor lainnya yang mengalami penurunan.

4.3.6. Pengangguran Terbuka

Tabel 4.15. Pengangguran Terbuka DIY Tahun 2014/2015 dan 2015/2016

Nilai \ Tahun	2014/2015	2015/2016
Proyeksi (orang)	84.285	80.470
Realisasi (orang)	67.418	n.a
Perubahan (orang)	-16.867	-

Sumber: Penyusunan Makro Ekonomi Prov DIY 2014 dan BPS

Realisasi pengangguran terbuka di DIY untuk tahun 2014 lebih kecil dibanding proyeksinya. Hal ini menunjukkan perkembangan yang positif karena angka pengangguran dapat ditekan. Akan tetapi angka pengangguran di DIY tersebut masih cukup tinggi, sehingga diperlukan upaya lebih serius lagi untuk menekannya dengan meningkatkan keterampilan dan pendidikan SDM yang sesuai dengan peluang kerja yang tersedia serta terus memperbesar kesempatan kerja di setiap sektor ekonomi yang ada.

4.3.7. Angkatan Kerja

Tabel 4.16. Angkatan Kerja DIY Tahun 2014/2015 dan 2015/2016

Nilai \ Tahun	2014/2015	2015/2016
Proyeksi (orang)	1.953.928	1.961.418
Realisasi (orang)	2.023.461	n.a
Perubahan (orang)	69.533	-

Sumber: Penyusunan Makro Ekonomi Prov DIY 2014 dan BPS

Bab IV Hasil Proyeksi dan Analisis

Tahun 2014 realisasi jumlah angkatan kerja di DIY mengalami kenaikan sebesar 69.533 orang dibandingkan proyeksinya. Ini dimungkinkan karena terjadinya penambahan penduduk usia kerja yang besar di atas yang diproyeksikan yang masuk ke angkatan kerja.

4.3.8. Kemiskinan

Tabel 4.17. Kemiskinan DIY Tahun 2014/2015 dan 2015/2016

Nilai \ Tahun	2014/2015	2015/2016
Proyeksi (%)	14,46	13,84
Realisasi (%)	14,55	13,61
Perubahan (%)	0,09	-0,23

Sumber: Penyusunan Makro Ekonomi Prov DIY 2014 dan BPS

Kemiskinan yang diukur dengan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk DIY menunjukkan bahwa realisasi kemiskinan pada tahun 2014 terlihat lebih tinggi 0,09 persen dibandingkan proyeksinya. Sedangkan pada tahun 2015 nilai realisasi lebih rendah dibandingkan nilai proyeksinya. Secara keseluruhan kemiskinan di DIY mengalami penurunan, tetapi tingkat kemiskinan di DIY terbilang masih tinggi. Efektifitas program pengentasan kemiskinan perlu dikaji kembali untuk dapat menghasilkan penurunan tingkat kemiskinan sesuai targetnya.

Persoalan kemiskinan bukan hanya berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman (*poverty gap index*) dan tingkat keparahan (*poverty severity index*) dari kemiskinan. Artinya, selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan itu.

4.3.9. Indeks Williamson

Tabel 4.18. Indeks Williamson DIY Tahun 2014/2015 dan 2015/2016

Nilai \ Tahun	2014/2015	2015/2016
Proyeksi	0,4610	0,4640
Realisasi	0,4724	0,4695
Perubahan	0,0114	0,0055

Sumber: Penyusunan Makro Ekonomi Prov DIY 2014 dan BPS

Bab IV Hasil Proyeksi dan Analisis

Realisasi IW tahun 2014 maupun 2015 masih lebih tinggi dibandingkan proyeksinya, meskipun demikian terjadi penurunan kesenjangan dari tahun 2014 yakni sebesar 0,4724 menjadi 0,4695 tahun 2015. Cukup tingginya nilai IW disebabkan oleh terjadinya ketidakseimbangan kinerja ekonomi antar kabupaten dan kota di-DIY.

4.3.10. Indeks Gini

Tabel 4.19 Indeks Gini DIY Tahun 2014/2015 dan 2015/2016

Tahun	2014/2015	2015/2016
Nilai		
Proyeksi	0,309	0,307
Realisasi	0,435	n.a
Perubahan	0,126	-

Sumber: Penyusunan Makro Ekonomi Prov DIY 2014 dan BPS

Pada tahun 2014, realisasi IG sebesar 0,435 yang masih dalam kelompok ketimpangan rendah ($IG < 0,5$). Indeks Gini DIY tahun 2014 ini masih terbilang rendah karena masih berada di sekitaran angka $0,3 < 0,5$.

4.3.11. Ketimpangan

4.3.11.1. Investasi

Berdasarkan tabel 4.20. menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman memiliki nilai investasi tertinggi dengan rata-rata sebesar 8.554.229 juta rupiah dengan nilai rata-rata share sebesar 44,90 persen. Peningkatan investasi di Kabupaten Sleman disebabkan oleh banyaknya investor yang tertarik menanamkan modalnya di Kabupaten tersebut. Hal ini tercermin dari banyaknya pembangunan mall, hotel dan apartemen di Kabupaten Sleman. Rata-rata tertinggi kedua yakni Kota Yogyakarta dengan nilai investasi sebesar 5.067.155 juta rupiah dengan rata-rata share sebesar 26,60 persen. Sejalan dengan Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta merupakan daerah yang sangat potensial untuk dikembangkan ekonominya karena berada di tengah kegiatan ekonomi DIY yang sangat strategis. Ditempat ketiga, keempat dan kelima masing masing adalah Kabupaten Bantul dengan nilai investasi sebesar 3.300.375 juta rupiah, Kabupaten Gunungkidul dengan nilai investasi sebesar 2.596.070 juta rupiah dan Kabupaten Kulon Progo sebesar 1.618.511 juta rupiah.

Meningkatnya nilai investasi di DIY tersebut dapat terjadi akibat dari semakin gencarnya promosi dan perbaikan layanan bagi investor yang akan menanamkan

Bab IV Hasil Proyeksi dan Analisis

investasinya di DIY. Bentuk investasi yang dilakukan di wilayah DIY, seperti pembangunan hotel, Pembangunan Bandara Internasional Kulon Progo, Kawasan Industri Baja, Pembangunan *Inland Port* di Kabupaten Bantul, Pembangunan Jalan tol Yogyakarta– Bawen Provinsi DIY-Jateng, Pengembangan kawasan perekonomian Stasiun Tugu dan Malioboro Kota Yogyakarta, Pengembangan Baron *Technopark* dan Industri perikanan tangkap skala nasional di Gunungkidul. Selain itu, terdapat beberapa proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan seperti pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto di Temon dan infrastruktur pendukungnya antara lain Tempat Pelelangan Ikan (TPI), *shelter* nelayan, pabrik es, *docking* atau tempat perbaikan kapal dan pemecah ombak. Meskipun demikian ketimpangan dalam realisasi investasi di DIY masih terlihat, hal ini bisa dicermati dengan melihat realisasi investasi di Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo yang cukup rendah. Investasi yang belum maksimal di Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo berbeda dengan yang terjadi di wilayah Sleman dan Yogyakarta.

Tabel 4.20.
Nilai Investasi menurut Kabupaten/Kota di DIY atas Dasar Harga Konstan 2010, 2011-2015 (Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014*	2015**	rata-rata
Kulon Progo	1.481.228	1.547.101	1.615.213	1.694.703	1.754.308	1.618.511
	7,78	8,12	8,48	8,90	9,21	8,50
Bantul	2.973.449	3.131.690	3.290.941	3.466.115	3.639.678	3.300.375
	15,61	16,44	17,28	18,20	19,11	17,33
Gunungkidul	2.372.150	2.470.653	2.582.320	2.711.059	2.844.167	2.596.070
	12,45	12,97	13,56	14,23	14,93	13,63
Sleman	7.631.626	8.079.849	8.532.740	9.063.136	9.463.795	8.554.229
	40,06	42,41	44,79	47,58	49,68	44,90
Yogyakarta	4.591.151	4.824.221	5.066.226	5.363.140	5.491.038	5.067.155
	24,10	25,32	26,59	28,15	28,82	26,60
Jumlah	19.049.654	19.049.654	19.049.654	19.049.654	19.049.654	19.049.654

Sumber: BPS DIY. Keterangan : *angka sementara; **angka sangat sementara
Angka cetak miring adalah share investasi

Bab IV Hasil Proyeksi dan Analisis

Tingginya pertumbuhan investasi sayangnya tidak disertai oleh perbaikan produktivitas capital yang ditunjukkan oleh nilai *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR). Pada tahun 2014 terjadi peningkatan nilai ICOR di DIY, meningkatnya nilai ICOR tersebut disebabkan oleh investasi yang belum menyebar di semua wilayah tetapi masih didominasi oleh wilayah Sleman dan Kota Yogyakarta. Kemudian infrastruktur yang masih minim di beberapa wilayah di DIY telah menyebabkan efisiensi penggunaan investasi untuk menghasilkan *output* di DIY masih perlu ditingkatkan..

**Tabel 4.21. ICOR Kabupaten/Kota di DIY dengan Pendekatan
Investasi=PMBT+perubahan inventori, 2011-2015**

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014*	2015**	rata-rata
Kulon Progo	6,95	6,76	6,06	6,49	6,29	6,51
Bantul	4,84	4,62	4,50	4,76	4,90	4,72
Gunungkidul	5,93	5,52	5,36	5,87	5,55	5,65
Sleman	6,56	6,16	6,05	6,6	6,67	6,41
Yogyakarta	3,94	3,68	3,59	3,91	3,87	3,80
DIY	5,66	5,48	5,36	5,71	5,92	5,69

Sumber: BPS DIY

Keterangan : *angka sementara; **angka sangat sementara

4.3.11.2. Disparitas PDRB

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun). PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada suatu saat tertentu sebagai tahun dasar.

Bab IV Hasil Proyeksi dan Analisis

Tabel 4.22. Nilai dan *Share* PDRB Kabupaten dan Kota Terhadap PDRB DIY

Kabupaten /Kota	Tahun											
	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	Nilai	Share	Nilai ¹⁾	Share	Nilai	Share	Nilai	Share	Nilai	Share	Nilai	Share
Kulon Progo	5.033.074	7,78	5.246.147	7,71	5.475.148	7,63	5.741.660	7,59	5.992.787	7,53	6.222.245	7,45
Bantul	12114059.2	18,73	12.728.666.3	18,70	13.407.021.8	18,69	14.138.719.3	18,69	14.867.408.8	18,69	15.626.400.3	18,71
Gunung Kidul	8.848.097.90	13,68	9.248.010.9	13,59	9.695.979.8	13,52	10.177.432.5	13,45	10.639.465.7	13,37	11.158.220.9	13,36
Sleman	21.481.644	33,21	22.645.852	33,27	23.957.113	33,40	25.367.414	33,53	26.740.537	33,61	28.176.504	33,73
Kota Yogyakarta	17.202.154	26,60	18.206.090	26,74	19.189.075	26,75	20.239.558	26,75	21.312.144.0	26,79	22.349.275.0	26,76
Prov.DIY	64.679.029	100,00	68.074.766	100,00	71.724.338	100,00	75.664.784	100,00	79.552.342	100,00	83.532.645	100,00

Sumber: BPS DIY, diolah.

Pangsa (*share*) PDRB antar Kabupaten/Kota di DIY pada beberapa tahun terakhir nampaknya tidak terlalu fluktuatif. Distribusi PDRB antar Kabupaten/Kota di DIY ditunjukkan pada Tabel 4.22. Dari tabel ini dapat ditunjukkan bahwa pangsa PDRB dari Kabupaten/Kota di DIY yang terbesar adalah Kabupaten Sleman, diikuti oleh Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, dan yang terakhir adalah Kabupaten Kulon Progo.

Kabupaten Sleman memiliki pertumbuhan ekonomi yang berada di atas pertumbuhan ekonomi DIY dalam empat tahun terakhir. Sedangkan Kota Yogyakarta memiliki pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan ekonomi DIY dua tahun terakhir dan Kabupaten Bantul baru satu tahun terakhir. Sedangkan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul selalu berada di bawah pertumbuhan ekonomi DIY.

**Tabel 4.23.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota dan DIY ADHK Tahun 2000
Tahun 2012-2015 (%)**

Kabupaten/ Kota	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
Kulon Progo	4,37	4,87	4,37	3,83
Bantul	5,46	5,46	5,15	5,11
Gunung Kidul	4,84	4,97	4,54	4,88
Sleman	5,79	5,89	5,41	5,37
Yogyakarta	5,40	5,47	5,30	4,87
DIY	5,4	5,5	5,2	4,9

Sumber: Data BPS, diolah.

4.3.11.3. Disparitas Pendapatan Perkapita

Agak berbeda dengan indikator *share* dan pertumbuhan PDRB, pendapatan per kapita berdasarkan harga berlaku tertinggi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 di antara Kabupaten/Kota di DIY adalah Kota Yogyakarta diikuti Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan pendapatan perkapita berdasarkan harga berlaku terendah dalam periode yang sama adalah Kabupaten Kulon Progo. Secara rinci data tentang jumlah pendapatan per kapita di Kabupaten/Kota di DIY ditunjukkan pada Tabel 4.24.

Tabel 4.24.

**Tingkat Pendapatan Per kapita ADHB 2000
Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2010 - 2014**

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013^{*)}	2014^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulonprogo	9.120.975	9.910.472	10.671.984	11.770.582	12.216.586
Bantul	9.956.746	10.960.317	12.114.961	13.564.996	14.826.691
Gunungkidul	9.807.962	10.694.252	11.628.655	12.980.950	13.732.092
Sleman	12.451.096	13.634.545	14.976.756	16.920.504	17.723.220
Yogyakarta	30.303.585	33.189.951	36.363.267	40.472.989	43.512.626
D I Y	12.083.874	13.195.095	14.849.534	16 227 097	19.483.414

Sumber : BPS DIY 2014

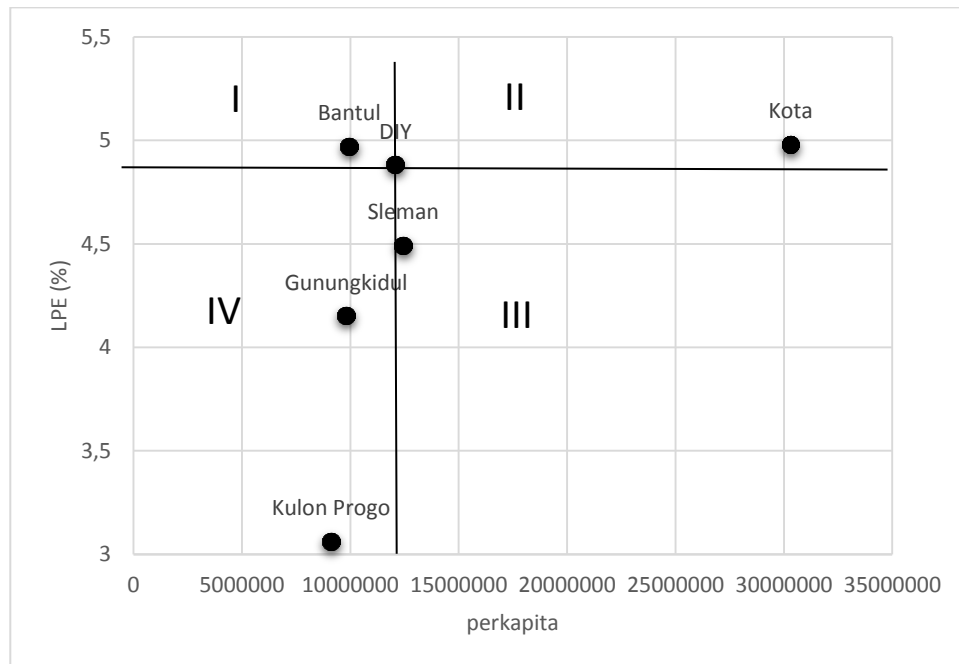
Dari data pada Tabel 4.25. menunjukkan bahwa pendapatan perkapita di Kabupaten/Kota DIY terus mengalami peningkatan. Rata-rata peningkatan tertinggi adalah Kota Yogyakarta yakni 36.768.484 rupiah kemudian diikuti Kabupaten Sleman yakni 15.141.224 rupiah dan yang terakhir Kabupaten Kulon Progo yakni 10.738.120 rupiah. Pendapatan per kapita Kota Yogyakarta pada tahun 2014 sebesar 2,23 kali pendapatan per kapita DIY, dan empat Kabupaten lainnya jauh di bawah tingkat pendapatan per kapita Kota Yogyakarta.

4.3.11.4. Tipologi Klassen

Tipologi Klassen adalah gambaran untuk menunjukkan adanya tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah. Menggunakan bidang pencaran (*scattered plot*) dengan variabel Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan nilai PDRB per kapita untuk seluruh Kabupaten/Kota di DIY maka dapat digambarkan Tipologi Klassen

Gambar 4.11. Tipologi Klassen

**Menggunakan Variabel Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Per Kapita
Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2010**

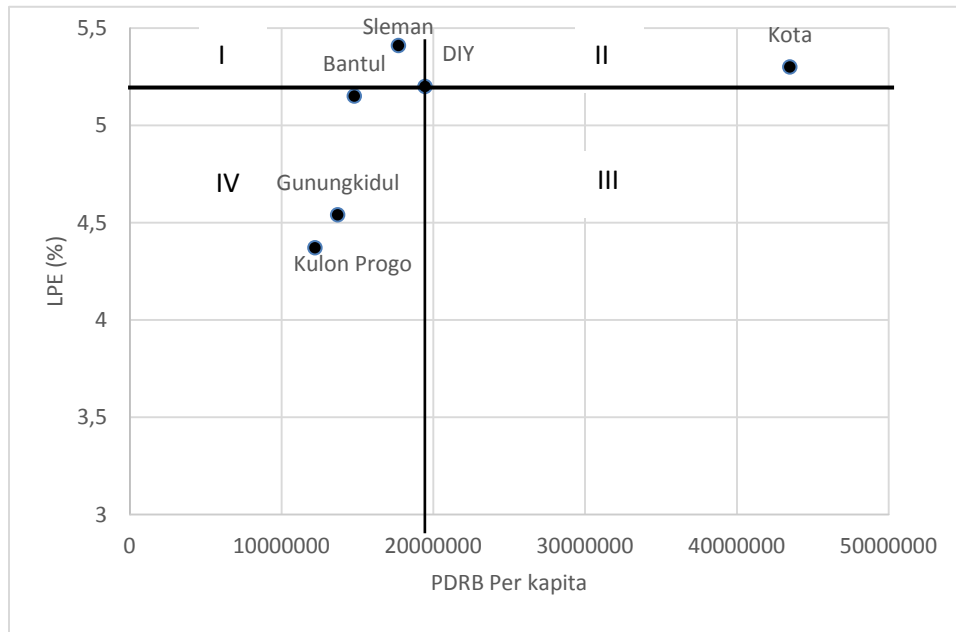


Pada tahun 2010, Kabupaten Bantul berada pada kuadran I, sebagai “daerah berkembang pesat”, sedangkan Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul masih berada di posisi kuadran IV dan Kabupaten Sleman berada pada kuadran III. Sedangkan Kota Yogyakarta semakin melaju tapi tetap pada posisi kuadran II sebagai “daerah yang maju dan cepat tumbuh” yang dicerminkan oleh laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita yang tinggi. Hal ini menunjukkan, bahwa Kota Yogyakarta merupakan bagian wilayah di Provinsi DIY yang secara ekonomi memiliki kekuatan untuk tumbuh terus dalam jangka panjang.

Pada tahun 2014, tidak terjadi perubahan yang berarti, perubahan hanya terjadi pada Kabupaten Bantul yang bergeser dari posisi di kuadran I menjadi di kuadran IV, artinya telah terjadi penurunan laju pertumbuhan ekonomi dan Kabupaten Sleman dari kuadran III menjadi kuadran I, Artinya terjadi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Posisi Kabupaten Bantul di kuadran IV bersama-sama Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul. Sleman tetap berada pada kuadran I dan Kota Yogyakarta tetap berada pada kuadran II.

Gambar 4.12. Tipologi Klassen

**Menggunakan Variabel Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Per Kapita
Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2014**



Kabupaten Sleman tetap berada pada kuadran I, sebagai “daerah berkembang pesat”, karena memiliki laju pertumbuhan yang tinggi, sedangkan Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul berada di posisi kuadran IV. Sedangkan Kota Yogyakarta semakin melaju tapi tetap pada posisi kuadran II sebagai “daerah yang maju dan cepat tumbuh” yang dicerminkan oleh laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita yang tinggi. Kabupaten Sleman meraih perkembangan yang sangat baik dengan memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya. Artinya kabupaten Sleman telah berhasil menaikkan laju pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Kota Yogyakarta meskipun masih di kuadran II, tetapi dilihat dari posisinya menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi terjadi penurunan tetapi pendapatan perkapita masyarakatnya terjadi kenaikan. Perubahan posisi tersebut menunjukkan, bahwa Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta merupakan bagian wilayah di Provinsi DIY yang secara ekonomi memiliki kekuatan untuk tumbuh terus dalam jangka panjang.

Tipologi Klassen menurut Kabupaten/Kota di DIY di atas menunjukkan bahwa kesenjangan antar wilayah di DIY masih ada dan menjadi kendala dalam pembangunan daerah di DIY. Kondisi kesenjangan antar wilayah di DIY tersebut harus segera dibenahi di antaranya melalui kebijakan pemerataan pembangunan

Bab IV Hasil Proyeksi dan Analisis

dengan mengarahkan atau memberi porsi investasi yang lebih besar dibandingkan kondisi sekarang ke Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul, sehingga kabupaten tersebut dapat tumbuh ekonominya lebih tinggi lagi dan keseimbangan investasi di DIY lebih dapat terwujud sehingga diharapkan akan dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah di DIY.

4.3.11.5. Perubahan Struktural Ekonomi di DIY

Mengacu pada PDRB atas harga konstan 2010, perkembangan tiap lapangan usaha primer, sekunder dan tersier dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.25.

**Perkembangan Lapangan Usaha Primer Berdasarkan PDRB ADHK 2010 DIY
Tahun 2010-2015 (Juta Rupiah)**

Uraian	2010			2011			2012		
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian	7.252.595,20	primer	11,84	7.134.678,90	primer	11,13	7.500.728,20	primer	11,08
	11,21			10,48			10,46		
	406.711,00			436.328,70			443.626,90		
	0,63			0,64			0,62		
Uraian	2013			2104			2015		
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian	7.670.026,20	primer	10,75	7.508.980,30	primer	10,03	7.703.978,10	primer	9,8
	10,14			9,44			9,23		
	461.013,80			470.734,60			471.323,20		
	0,61			0,59			0,56		

Sumber: BPS, diolah keterangan: cetak miring adalah nilai share PDRB

Berdasarkan tabel 4.25 terlihat bahwa sektor primer setiap tahunnya mengalami penurunan. Pada tahun 2010 sektor primer sebesar 11,84 persen, kemudian tahun 2011 kembali mengalami penurunan menjadi 11,13 persen dan pada tahun 2015 menjadi 9,8 persen.

Tabel 4.26.

**Perkembangan Lapangan Usaha Seunder Berdasarkan PDRB ADHK 2010 DIY
Tahun 2010-2015 (Juta Rupiah)**

Uraian	2010			2011			2012		
Industri Pengolahan	9.215.500,00	14,25	sekunder	9.711.791,70	14,27	sekunder	9.435.888,00	13,16	22,87
Pengadaan Listrik, Gas	94.730,00	0,15	24,07	100.058,90	0,15	24,06	110.269,80	0,15	

Bab IV Hasil Proyeksi dan Analisis

Pengadaan Air	76.110,90			76.349,50			78.992,20		
	0,12			0,11			0,11		
Konstruksi	6.183.440,10			6.483.267,40			6.772.475,90		
	9,56			9,53			9,45		
Uraian	2013			2104			2015		
Industri Pengolahan	10.084.213,30			10.469.636,90			10.652.525,10		
	13,33			13,16			12,76		
Pengadaan Listrik, Gas	116.969,20			121.267,50			119.663,10		
	0,15			0,15			0,14		
Pengadaan Air	79.739,90			82.855,40			85.260,20		
	0,11			0,1			0,1		
Konstruksi	7.106.854,70			7.508.543,30			7.826.700,70		
	9,4			9,44			9,38		
		sekunder	22,99		sekunder	22,86		sekunder	22,39

Sumber: BPS, diolah keterangan: cetak miring adalah nilai share PDRB

Seperti halnya sektor primer, berdasarkan tabel 4.26 terlihat bahwa sektor sekunder juga setiap tahunnya mengalami penurunan. Pada tahun 2011 sektor sekunder turun sebesar 0,01 persen dari 24,07 persen pada tahun 2010 menjadi 24,06 persen pada tahun 2011, kemudian tahun 2013 mengalami Kenaikan dari 22,87 pada tahun 2012 menjadi 22,99 persen pada tahun 2013 dan tahun pada tahun 2015 turun menjadi 22,39 persen.

Tabel 4.27.

Perkembangan Lapangan Usaha Tersier Berdasarkan PDRB ADHK 2010 DIY Tahun 2010-2015 (Juta Rupiah)

Uraian	2010			2011			2012		
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.146.467,00	tersier	64,09	5.410.096,50	tersier	64,82	5.878.431,70	tersier	66,05
	7,96			7,95			8,2		
3.651.707,30	3.795.544,70			3.975.070,50					
5,65	5,58			5,54					
5.740.109,60	6.066.531,90			6.480.399,20					
8,87	8,91			9,04					
6.184.505,40	6.775.394,20			7.503.157,60					
9,56	9,96			10,46					
2.037.371,60	2.268.272,60			2.341.597,70					
3,15	3,33			3,27					
Real Estate	4.498.312,60		4.699.363,40		5.116.888,20				

Bab IV Hasil Proyeksi dan Analisis

	6,95			6,91			7,14		
Jasa Perusahaan	722.493,10			769.963,30			831.517,10		
	1,12			1,13			1,16		
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.777.665,90			4.999.227,10			5.373.904,20		
	7,39			7,35			7,49		
Jasa Pendidikan	5.428.054,80			5.841.702,30			6.148.737,30		
	8,39			8,58			8,58		
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.540.105,80			1.640.479,00			1.791.076,00		
	2,38			2,41			2,5		
Jasa lainnya	1.723.087,80			1.840.824,20			1.919.688,60		
	2,66			2,71			2,68		
Uraian	2013			2104			2015		
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.187.855,10			6.540.107,50			6.944.902,70		
	8,18			8,22			8,32		
Transportasi dan Pergudangan	4.217.506,90			4.377.849,80			4.541.309,50		
	5,58			5,5			5,44		
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.942.541,10			7.414.021,00			7.842.132,30		
	9,18			9,32			9,4		
Informasi dan Komunikasi	7.969.970,40			8.458.713,20			8.891.144,90		
	10,54			10,64			10,65		
Jasa Keuangan	2.610.919,10			2.826.933,50			3.060.732,90		
	3,45			3,55			3,67		
Real Estate	5.322.003,80	tersier	66,26	5.735.457,10	tersier	67,11	6.105.125,60	tersier	67,82
	7,04			7,21			7,31		
Jasa Perusahaan	858.734,20			924.041,70			991.563,80		
	1,14			1,16			1,19		
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.639.411,80			5.971.985,60			6.281.580,30		
	7,46			7,51			7,53		
Jasa Pendidikan	6.430.385,50			6.938.845,30			7.444.276,50		
	8,5			8,72			8,92		
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.916.373,70			2.062.978,60			2.210.405,60		
	2,53			2,59			2,65		
Jasa lainnya	2.012.930,90			2.119.325,90			2.288.950,10		
	2,66			2,66			2,74		

Sumber: BPS, diolah keterangan: cetak miring adalah nilai share PDRB

Berbeda dengan sektor primer dan sekunder, berdasarkan tabel 4.27 sektor primer terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2010 sektor

tersier sebesar 64,09 persen kemudian terus mengalami peningkatan menjadi 66,05 persen pada tahun 2012 dan naik menjadi 67,82 persen pada tahun 2015.

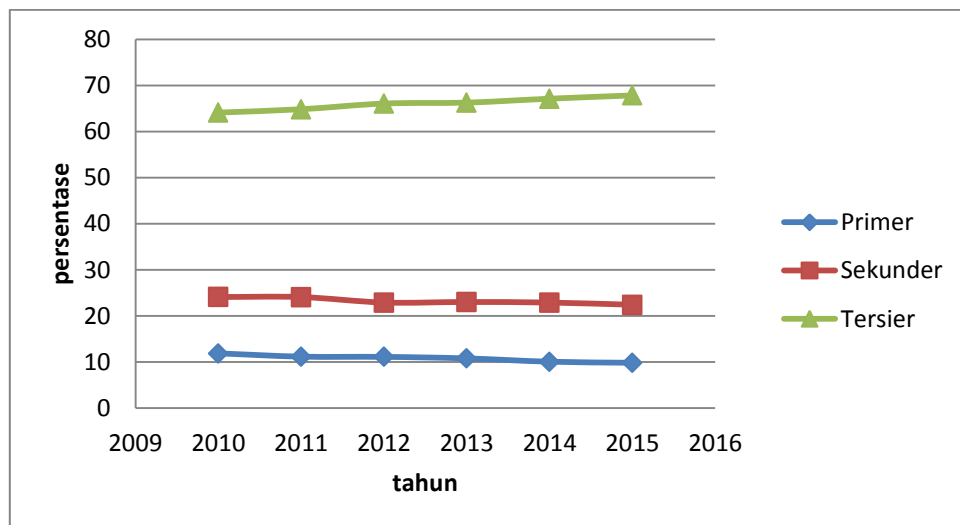
Tabel 4.28.

Perkembangan Lapangan Usaha Primer, Sekunder dan Tersier Berdasarkan PDRB ADHK 2010 DIY Tahun 2010-2015 (persen)

Sektor	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Primer	11,84	11,13	11,08	10,75	10,03	9,8
Sekunder	24,07	24,06	22,87	22,99	22,86	22,39
Tersier	64,09	64,82	66,05	66,26	67,11	67,82

Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan tabel 4.28 terlihat bahwa sektor tersier merupakan sektor dominan di DIY. Perkembangan sektor tersier dari tahun 2010 sampai 2015 selalu di atas 50 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor tersier menyumbang lebih dari setengahnya terhadap peningkatan PDRB DIY.



Gambar 4.13. Perkembangan Lapangan Usaha Primer, Sekunder dan Tersier Berdasarkan PDRB ADHK 2010 DIY Tahun 2010-2015 (Persen)

Berdasarkan gambar 4.13 terlihat jelas terjadi gap yang cukup besar antara sektor tersier dengan sektor sekunder dan primer. Sektor primer terus mengalami penurunan, sedangkan sektor tersier terus mengalami peningkatan dan sektor sekunder meskipun tahun 2013 mengalami kenaikan, tetapi secara keseluruhan punya kecenderungan menurun.

Bab IV Hasil Proyeksi dan Analisis

4.4. Skema Pencapaian Target Pertumbuhan Ekonomi RPJMD 2012-2017

4.4.1. Kabupaten Kulon Progo

Tabel 4.29. Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kulon Progo 2016-2017

Indikator	Tahun	
	2016	2017
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,39	5,47

Sumber: RPJMD DIY 2012-2017

**Tabel 4.30. PDRB Lapangan Usaha (Juta Rupiah)
KABUPATEN KULON PROGO**

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.104.309	1.131.361	1.115.668	1.160.554	1.188.059	1.231.334
B	Pertambangan dan Penggalan	86.178	90.140	91.487	97.093	102.441	108.956
C	Industri Pengolahan	648.523	696.307	753.995	754.466	781.426	819.632
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5.365	5.714	5.843	6.270	6.829	7.395
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.155	8.242	8.341	8.508	8.656	8.897
F	Konstruksi	464.304	483.856	508.856	531.260	560.666	597.340
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	718.883	757.218	796.718	841.906	898.135	966.072
H	Transportasi dan Pergudangan	486.870	502.392	512.691	519.724	528.650	545.058
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	194.959	209.359	219.374	229.497	243.445	260.478
J	Informasi dan Komunikasi	331.730	352.124	378.090	401.151	432.733	470.011
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	139.057	157.992	175.745	183.908	200.620	219.974
L	Real Estate	194.169	202.865	213.562	223.808	236.985	253.257

Bab IV Hasil Proyeksi dan Analisis

M,N	Jasa Perusahaan	17.618	18.329	19.560	20.189	21.184	22.509
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	438.666	461.078	488.812	512.345	576.460	584.189
P	Jasa Pendidikan	339.596	353.044	373.044	391.920	415.986	445.420
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	79.976	84.986	91.000	96.280	103.833	112.565
R,S,T,U	Jasa lainnya	216.789	226.655	240.000	243.365	251.514	263.240
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5.475.147	5.741.662	5.992.786	6.222.244	6.557.622	6.916.327

Sumber: BPS, diolah

- 1) Pencapaian target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2016 sebesar 5,39 persen; tahun 2017 sebesar 5,47persen; yang sesuai dengan target di RPJMD DIY (2012-2017) hanya akan tercapai bilamana setiap lapangan usaha memenuhi target PDRB Kabupaten Kulon Progo sebagaimana perhitungan di atas.
- 2) Lapangan usaha yang dominan mempengaruhi perekonomian Kabupaten Kulon Progo adalah: **(1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (2) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (3) industri pengolahan; dan (4) Konstruksi.**

4.4.2. Kabupaten Bantul

Tabel 4.31. Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul 2016-2017

Indikator	Tahun	
	2016	2017
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,15	6,2

Sumber: RPJMD DIY 2012-2017

Bab IV Hasil Proyeksi dan Analisis

**Tabel 4.32. PDRB Lapangan Usaha (Juta Rupiah)
KABUPATEN BANTUL**

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.913.123	1.964.026	1.912.488	1.922.283	1.970.611	1.996.361
B	Pertambangan dan Penggalian	97.862	100.263	101.805	102.523	107.040	110.254
C	Industri Pengolahan	2.011.904	2.138.364	2.224.275	2.304.988	2.368.029	2.459.488
D	Pengadaan Listrik dan Gas	20.649	21.911	22.805	23.919	26.039	27.936
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12.152	12.222	12.649	13.082	13.822	14.428
F	Konstruksi	1.305.125	1.368.231	1.462.564	1.557.241	1.649.935	1.760.990
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.095.016	1.156.442	1.232.188	1.308.111	1.410.091	1.516.291
H	Transportasi dan Pergudangan	687.777	721.870	746.086	770.682	812.417	852.621
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.342.268	1.443.508	1.555.098	1.666.427	1.793.355	1.937.108
J	Informasi dan Komunikasi	1.277.884	1.358.557	1.454.258	1.554.907	1.702.460	1.848.730
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	314.930	351.945	390.477	400.570	446.735	487.016
L	Real Estate	870.666	910.010	989.905	1.072.942	1.143.598	1.233.527
M,N	Jasa Perusahaan	73.135	76.405	81.441	86.394	92.112	98.426
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	910.575	959.447	1.010.099	1.061.045	1.140.170	1.218.109
P	Jasa Pendidikan	948.652	996.812	1.073.654	1.148.438	1.227.748	1.319.321
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	244.130	262.487	281.683	299.837	326.648	353.996
R,S,T,U	Jasa lainnya	281.175	296.219	315.933	333.011	356.614	381.241
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	13.407.022	14.138.719	14.867.409	15.626.400	16.587.424	17.615.844

Sumber: BPS, diolah

Bab IV Hasil Proyeksi dan Analisis

- 1) Pencapaian target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul pada tahun 2016 sebesar 6,15persen; tahun 2017 6,2 persen; yang sesuai dengan target di RPJMD DIY (2012-2017) hanya akan tercapai bilamana setiap lapangan usaha memenuhi target PDRB Kabupaten Bantul sebagaimana perhitungan di atas.
- 2) Lapangan usaha yang dominan mempengaruhi perekonomian Kabupaten Bantul adalah:
(1) Industri pengolahan; (2) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (3) penyediaan akomodasi dan makanan minuman (4)Kontruksi; dan (5) Informasi dan komunikasi

4.4.3. Kabupaten Gunung Kidul

Tabel 4.34. Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunungkidul 2016-2017

Indikator	Tahun	
	2016	2017
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,01	5,12

Sumber: RPJMD DIY 2012-2017

**Tabel 4.35
PDRB Lapangan Usaha (Juta Rupiah)
KABUPATEN GUNUNG KIDUL**

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.452.277	2.508.677	2.493.156	2.538.173	2.576.410	2.610.964
B	Pertambangan dan Penggalian	151.108	158.456	160.985	165.883	172.891	179.002
C	Industri Pengolahan	895.218	968.728	1.008.531	1.048.304	1.076.798	1.117.598
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9.378	10.026	10.449	11.177	12.075	12.946
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16.545	16.785	17.437	17.940	17.891	18.314
F	Konstruksi	904.780	945.651	993.510	1.043.793	1.100.314	1.160.058
G	Perdagangan Besar dan Eceran;	866.000	910.272	971.904	1.032.335	1.096.095	1.166.675

Bab IV Hasil Proyeksi dan Analisis

	Reparasi Mobil dan Sepeda Motor						
H	Transportasi dan Pergudangan	523.855	548.633	561.987	580.658	601.016	622.372
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	507.494	549.676	596.989	642.796	680.626	729.501
J	Informasi dan Komunikasi	834.951	886.938	957.028	1.031.120	1.131.720	1.228.904
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	177.684	198.812	220.771	242.680	263.282	287.856
L	Real Estate	326.602	341.097	368.705	390.209	414.532	441.187
M,N	Jasa Perusahaan	48.071	49.767	52.937	55.963	60.156	64.118
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	849.357	887.945	939.395	990.812	1.052.814	1.116.742
P	Jasa Pendidikan	610.114	640.147	692.198	734.845	782.579	834.917
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	192.217	208.405	223.761	241.841	262.813	284.758
R,S,T,U	Jasa lainnya	330.331	347.420	369.723	389.692	415.235	441.258
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	9.695.980	10.177.433	10.639.466	11.158.221	11.717.248	12.317.171

Sumber: BPS, diolah

- 1) Pencapaian target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunung Kidul pada tahun 2016 sebesar 5,01 persen dan tahun 2017 sebesar 5,12 persen yang sesuai dengan target di RPJMD DIY (2013-2017) hanya akan tercapai bilamana setiap lapangan usaha memenuhi target PDRB Kabupaten Gunung Kidul sebagaimana perhitungan di atas,
- 2) Lapangan usaha yang dominan mempengaruhi perekonomian Kabupaten Gunung Kidul adalah: **(1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (2) industri pengolahan; (3) kontruksi; (4) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan (5) Informasi dan Komunikasi.**

4.4.4. Kabupaten Sleman

Tabel 4.35. Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sleman 2016-2017

Indikator	Tahun	
	2016	2017
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,11	6,15

Sumber: RPJMD DIY 2012-2017

Tabel 4.36. PDRB Lapangan Usaha (Juta Rupiah)
KABUPATEN SLEMAN

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.011.265	2.066.440	1.968.071	2.175.329	2.142.465	2.181.816
B	Pertambangan dan Penggalan	111.615	114.159	115.316	125.017	127.563	132.687
C	Industri Pengolahan	3.247.733	3.442.811	3.513.098	3.745.464	3.777.467	3.901.221
D	Pengadaan Listrik dan Gas	30.688	32.747	32.898	35.579	38.299	40.940
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12.402	12.547	13.051	13.875	14.040	14.528
F	Konstruksi	2.689.104	2.816.446	2.989.379	3.146.440	3.339.853	3.545.792
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.788.178	1.882.435	2.003.871	2.103.735	2.247.459	2.394.127
H	Transportasi dan Pergudangan	1.486.852	1.621.176	1.708.682	1.797.179	1.962.248	2.113.387
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.273.315	2.435.074	2.581.615	2.711.288	2.916.917	3.118.413

Bab IV Hasil Proyeksi dan Analisis

J	Informasi dan Komunikasi	2.370.708	2.571.044	2.757.451	2.884.483	3.194.712	3.464.972
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	630.612	713.637	793.030	809.385	899.628	977.796
L	Real Estate	1.923.377	2.019.632	2.188.666	2.279.477	2.454.883	2.626.083
M.N	Jasa Perusahaan	457.276	472.690	515.392	537.150	577.555	617.268
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.446.082	1.517.840	1.618.043	1.697.108	1.803.535	1.916.083
P	Jasa Pendidikan	2.370.403	2.470.133	2.681.853	2.795.219	2.975.680	3.164.194
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	550.303	593.990	641.583	667.675	733.182	791.991
R.S.T.U	Jasa lainnya	557.201	584.611	618.537	652.099	692.605	735.524
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	23.957.113	25.367.414	26.740.537	28.176.504	29.898.088	31.736.821

Sumber: BPS, diolah

- 1) Pencapaian target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman pada tahun 2016 sebesar 6,11 persen dan tahun 2017 sebesar 6,15 persen yang sesuai dengan target di RPJMD DIY (2013-2017) hanya akan tercapai bilamana setiap lapangan usaha memenuhi target PDRB Kabupaten Sleman sebagaimana perhitungan di atas.
- 2) Lapangan usaha yang dominan mempengaruhi perekonomian Kabupaten Sleman adalah:
(1) Industri Pengolahan; (2) Konstruksi; (3) Informasi dan Komunikasi (4) Jasa Pendidikan; dan (5) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

4.4.5. Kota Yogyakarta

Tabel 4.37. Target Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta 2016-2017

Indikator	Tahun	
	2016	2017

Bab IV Hasil Proyeksi dan Analisis

Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,4	6,61
--------------------------------	------------	-------------

Sumber: RPJMD DIY 2012-2017

Tabel 4.38. PDRB Lapangan Usaha (Juta Rupiah)
Kota Yogyakarta

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	35.709	36.100	35.734	35.800	35.891	36.026
B	Pertambangan dan Penggalian	837	839	850	858	840	838
C	Industri Pengolahan	2.630.977	2.813.953	2.943.834	2.997.014	3.113.162	3.246.984
D	Pengadaan Listrik dan Gas	45.057	47.599	49.151	49.390	54.440	58.082
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	30.167	30.712	31.963	32.068	32.864	33.783
F	Konstruksi	1.526.572	1.600.097	1.674.189	1.746.408	1.842.215	1.950.044
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.326.261	1.407.239	1.468.894	1.558.645	1.643.670	1.750.211
H	Transportasi dan Pergudangan	785.335	815.841	838.087	866.504	882.957	912.812
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.183.270	2.320.365	2.450.065	2.592.750	2.781.974	2.988.726
J	Informasi dan Komunikasi	2.654.508	2.779.291	2.900.953	3.088.922	3.355.145	3.620.934
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.077.853	1.196.259	1.275.250	1.352.121	1.473.344	1.600.453
L	Real Estate	1.782.655	1.848.546	1.973.549	2.081.602	2.210.373	2.361.711
M,N	Jasa Perusahaan	238.289	245.486	259.521	273.212	292.538	312.940
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.729.733	1.813.730	1.921.204	1.998.480	2.138.812	2.282.913
P	Jasa Pendidikan	1.889.249	1.960.166	2.088.606	2.216.520	2.354.763	2.519.065
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	721.039	766.207	818.611	850.119	923.224	993.768

Bab IV Hasil Proyeksi dan Analisis

R,S,T,U	Jasa lainnya	531.565	557.127	581.683	608.862	643.416	682.173
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	19.189.075	20.239.558	21.312.144	22.349.275	23.779.628	25.351.462

Sumber: BPS, diolah

- 1) Pencapaian target pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2016 sebesar 6,40 persen dan tahun 2017 sebesar 6,61 persen yang sesuai dengan target di RPJMD DIY (2013-2017) hanya akan tercapai bilamana setiap lapangan usaha memenuhi target PDRB Kota Yogyakarta sebagaimana perhitungan di atas.
- 2) Lapangan usaha yang dominan mempengaruhi perekonomian Kota Yogyakarta adalah: **(1) Informasi dan Komunikasi; (2) Industri Pengolahan; (3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; dan (4) Jasa Pendidikan.**

4.5. Kondisi Perekonomian Global 2014-2015

Kondisi perekonomian global menunjukkan pemulihan yang lebih lambat dari perkiraan, pada tahun 2015 ekonomi dunia turun menjadi 3,1 persen dari 3,4 persen pada tahun 2014, lebih rendah dari perkiraan awal 3,5 persen. Lanskap pertumbuhan ekonomi juga berubah, pertumbuhan ekonomi di negara berkembang (*emerging market*) melambat sementara pertumbuhan ekonomi di negara maju meningkat. Rata-rata pertumbuhan ekonomi negara maju meningkat dari 1,8 persen pada tahun 2014 menjadi 1,9 persen pada tahun 2015, sementara itu rata-rata pertumbuhan ekonomi di negara berkembang turun dari 4,6 persen pada tahun 2014 menjadi 4,0 persen pada tahun 2015.

Perlambatan ekonomi dunia 2015 disebabkan antara lain oleh perlambatan ekonomi Tiongkok, penurunan harga komoditas, ketidakpastian normalisasi kebijakan moneter AS, penurunan output potensial akibat faktor demografi, dan penurunan tingkat investasi dunia.

Ekonomi Tiongkok pada tahun 2014 berhasil tumbuh 7,3 persen namun pada tahun 2015 turun menjadi 6,9 persen. Perlambatan ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang menetapkan *rebalancing economy*, yaitu peralihan dari ekonomi yang didorong oleh sektor investasi menjadi ekonomi yang didorong oleh konsumsi. Perlambatan investasi di Tiongkok terus terjadi sementara akselerasi peningkatan

Bab IV Hasil Proyeksi dan Analisis

konsumsi belum cukup menopang pertumbuhan secara keseluruhan. Akibatnya, permintaan impor Tiongkok menurun, dan negara-negara yang menjadi mitra dagang negara tersebut tentu saja terkena dampaknya.

Pelemahan ekonomi Tiongkok juga menyebabkan harga komoditas global terkoreksi, tidak lain karena Tiongkok merupakan konsumen utama dari produk ekspor negara-negara berkembang seperti Indonesia. Penurunan harga komoditas global bisa dilihat dari Indeks Harga Komoditas Ekspor Indonesia (IHKEI) pada tahun 2015 yang berkontraksi sebesar 14,9 persen, terutama bersumber dari penurunan harga batubara, kelapa sawit dan karet. Harga komoditas batubara, kelapa sawit, dan karet masing-masing turun sebesar 24,5 persen, 8,2 persen, dan 18,6 persen. Penurunan harga batubara dipicu oleh turunnya impor Tiongkok, akibat dari kebijakan pemerintah setempat untuk mengurangi emisi karbon dalam pembangkit listrik. Sementara itu turunnya harga kelapa sawit disebabkan oleh melimpahnya penawaran kelapa sawit dari Malaysia, dan lemahnya harga karet terjadi karena adanya pergeseran permintaan Tiongkok dari yang sebelumnya karet alam menjadi karet sintesis.

Harga komoditas global dari sisi harga minyak dunia juga mengalami tren penurunan selama tahun 2015. Hal ini disebabkan oleh tingginya *supply* minyak dari negara anggota OPEC dan non OPEC ditengah melemahnya permintaan global terhadap komoditas tersebut. Kedepan resiko penurunan harga minyak masih cukup besar, terlebih lagi AS menerapkan kebijakan pelonggaran restriksi ekspor bersamaan dengan kebijakan Iran untuk menambah suplai minyak setelah tercapainya kesepakatan nuklir. Sebaliknya, potensi penurunan suplai minyak AS akibat berkurangnya investasi di sektor perminyakan dapat menyebabkan resiko harga minyak dunia meningkat.

Pertumbuhan ekonomi yang lambat dan harga komoditas yang terus turun menyebabkan laju inflasi dunia juga turun. Pada tahun 2015, laju inflasi global hanya tercatat sebesar 3,3 persen, lebih sedikit dari pada laju inflasi global tahun sebelumnya yang mencapai 3,5 persen. Kontributor utama nya adalah negaramaju, laju inflasi di negara maju turun menjadi 0,4 persen pada tahun 2015 jauh dibawah laju inflasi pada tahun 2014 sebesar 1,4 persen. Sementara di negara berkembang, laju inflasi 2015 justru mengalami kenaikan menjadi 5,6 dari tahun sebelumnya 2014 sebesar 5,1 persen.

Bab IV Hasil Proyeksi dan Analisis

Perlambatan ekonomi dunia juga disebabkan oleh kondisi ketidakpastian pasar keuangan global. Perlambatan itu utamanya dipicu oleh ketidakpastian The Fed menetapkan kebijakan kenaikan suku bunga yang sudah dimulai sejak akhir 2014 dan akhirnya baru benar-benar ditetapkan pada Desember 2015, diikuti krisis keuangan Yunani pada Maret 2015, serta devaluasi mata uang Yuan pada Agustus 2015. Mengenai pasar keuangan global, indeks komposit harga saham global turun menjadi 142,3 pada tahun 2015 dari yang sebelumnya 146,3 pada tahun 2014. Kondisi yang sama juga terjadi pada indeks komposit saham di negara berkembang Asia, Asia Pasifik, dan negara anggota G7.

Respon atas kondisi ekonomi dan keuangan global telah ditempuh oleh negara-negara berkembang melalui bauran kebijakan yang memadukan pelonggaran kebijakan kebijakan moneter dengan kebijakan makroprudensial, kebijakan fiskal, dan reformasi struktural. Dalam hal ini negara-negara maju lebih memilih mengandalkan kebijakan moneter dalam mendorong pertumbuhan ekonomi mereka. Belajar dari situ, negara-negara berkembang seperti Indonesia, India, dan Tiongkok secara konsisten menerapkan bauran kebijakan pengelolaan makro ekonomi yang sehat dengan menyertakan agenda reformasi struktural. Reformasi struktural menjadi agenda utama yang wajib dilakukan oleh negara berkembang untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing agar perekonomian dapat tumbuh berkelanjutan.

Negara-negara maju dalam merespon dinamika ekonomi dan keuangan global masih menggunakan kebijakan moneter sebagai kebijakan yang utama, yaitu melalui instrumen suku bunga. The Fed menaikkan suku bunga acuan di AS, sementara European Central Bank (ECB) dan Bank of Japan (BoJ) keduanya masih menerapkan suku bunga acuan yang sangat rendah, perbedaan ini merefleksikan fase perbedaan pemulihan ekonomi di negara masing-masing. Di samping itu kebijakan The Fed sejalan dengan perbaikan fundamental ekonomi di sektor tenaga kerja, sementara kebijakan ECB dan BoJ dilakukan untuk merespon peningkatan ancaman terhadap pelemahan ekonomi dan deflasi.

People Bank of China (PBoC) Tiongkok selama tahun 2015 telah melakukan pemotongan suku bunga sebanyak 5 kali, dengan total pemotongan mencapai 124 bps sampai pada level 4,35 persen saat ini. Selain itu juga menerapkan kebijakan penurunan GWM, injeksi likuiditas, dan memitigasi resiko dari kegiatan *shadow banking*. Di pasar

keuangan, Tiongkok juga melakukan kebijakan nilai tukar dan liberalisasi pasar keuangan, yaitu dengan cara memperlebar bond nilai tukar harian dari 1 persen menjadi 2 persen, mengubah rezim *fixed exchange rate* menjadi lebih fleksibel, serta membuka luas pada investor asing di pasar Tiongkok. Masih ada lagi kebijakan Tiongkok untuk merespon lemahnya pertumbuhan ekonomi, yaitu kebijakan peningkatan PDB dengan cara reformasi struktural *rebalancing economy* menuju peningkatan konsumsi domestik, stabilitas investasi dan peningkatan ekspor.

4.6 Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015

Pada Desember 2015, forum kerja sama regional ASEAN telah menyepakati momentum perekonomian baru yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN. Implementasi MEA dimaksudkan untuk membentuk negara-negara yang tergabung dalam ASEAN menjadi kekuatan ekonomi global baru melalui pasar tunggal dengan aliran bebas barang, modal, jasa, investasi, dan tenaga kerja terampil. Kawasan regional ASEAN juga diarahkan untuk membentuk kawasan yang berbasis produksi, berdaya saing tinggi, dan pembangunan merata yang terintegrasi dengan ekonomi global.

Di pasar barang, negara-negara di ASEAN telah mencapai keberhasilan yang cukup signifikan, tarif impor berhasil ditekan mendekati 0 persen. Keberhasilan itu diikuti dengan disediakannya fasilitas ASEAN *Single Window* untuk mendorong perdagangan intra ASEAN dengan menyederhanakan proses ekspor-impor dan standarisasi produk. Di pasar jasa juga demikian, sektor jasa yang dapat dimasuki penyedia jasa sesama negara ASEAN semakin banyak. Selain itu *Mutual Recognition Agreement* (MRA) untuk beberapa area tenaga kerja terampil juga sudah disusun untuk mendukung proses aliran bebas tenaga kerja di ASEAN.

Sektor perbankan dan jasa keuangan ASEAN sebagai bagian dari liberalisasi aliran modal menunjukkan keberhasilan yang tidak kalah menggemakan. Beberapa bank yang beroperasi di negara ASEAN telah melakukan kesepakatan untuk mendorong liberalisasi investasi intra ASEAN, menarik investasi asing dari luar ASEAN melalui promosi, perbaikan iklim bisnis, dan penyediaan infrastruktur.

Indonesia menjadi salah satu negara di ASEAN yang cukup progresif melakukan liberalisasi. Untuk mendukung upaya tersebut, Indonesia telah menurunkan tarif ATIGA (*ASEAN Trade in Goods Agreement*) dan aktif memanfaatkan tariff tersebut untuk meningkatkan aliran barang intra ASEAN. Di sektor keuangan, Indonesia bersama negara anggota ASEAN lainnya telah menyepakati Paket 6 jasa keuangan ASEAN

Bab IV Hasil Proyeksi dan Analisis

Framework Agreement on Services (AFAS) dan pedoman ASEAN Banking Integration Framework (ABIF) untuk mendukung proses integrasi perbankan.

Keberhasilan implementasi MEA 2015 sebenarnya bukan merupakan tujuan akhir, melainkan batu loncatan untuk menuju visi ASEAN 2025. Visi tersebut tertuang dalam ASEAN *Economic Community (AEC) Blueprint 2025* yang telah disepakati bersama oleh seluruh pemimpin negara ASEAN di Malaysia pada 22 November 2015 yang lalu. AEC *Blueprint 2025* menyangkut lima karakteristik yang saling terkait dan memperkuat satu sama lain, yaitu: Ekonomi kohesif dan terintegrasi tinggi; ASEAN yang kompetitif, inovatif dan dinamis; Peningkatan konektivitas ekonomi dan integrasi sektoral; Pembentukan masyarakat ASEAN yang resilien, inklusif and berorientasi humanis; serta ASEAN Global.

Bauran kebijakan untuk merespon isu strategi implementasi MEA 2015 dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara terus berperan aktif dalam merumuskan arah integrasi keuangan ASEAN 2025. Bank Indonesia telah menyusun rencana strategis sebagai pedoman bagi *working committee* dalam menentukan arah dan kebijakan rencana aksi strategis. Rencana strategis tersebut disusun dengan memperhatikan relevansi enam karakteristik utama integrasi keuangan ASEAN, yaitu: (i) Memastikan proses jasa keuangan dan mobilisasi modal memenuhi kebutuhan sektor riil, (ii) Menyeimbangkan integrasi keuangan dengan stabilitas keuangan untuk memastikan bahwa manfaat dari integrasi tersebut akan berkelanjutan, (iii) Menurunkan biaya transaksi, (iv) Meningkatkan pilihan dan perlindungan konsumen, (v) Meningkatkan keuangan inklusif, dan (vi) Meningkatkan risiko diversifikasi.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Dari analisis data yang telah dilakukan maka kajian ini mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis kondisi ekonomi 2011-2015, yang mencakup indikator pertumbuhan ekonomi.

Laju pertumbuhan ekonomi DIY selama tahun 2011-2015 mengalami pasang surut. Pada tahun 2011 hingga 2013 laju pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan sebesar 5,2 persen pada tahun 2011 menjadi 5,4 persen di tahun 2012 dan menjadi 5,5 persen di tahun 2013. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2013 disebabkan oleh meningkatnya sektor pembentuk PDRB DIY, semua sektor tersebut mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 laju pertumbuhan ekonomi DIY mengalami penurunan sebesar 5,20 persen dan pada tahun 2015 menurun menjadi 4,94 persen. Melambatnya pertumbuhan ekonomi DIY terjadi seiring dengan melambatnya ekonomi nasional. Hampir semua sektor pertumbuhan ekonomi DIY mengalami penurunan kecuali sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan; Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor; serta jasa lainnya.

2. Angka proyeksi indikator ekonomi DIY 2016-2020 dan analisis asumsi yang digunakan (nilai PDRB, laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, ICOR, ketenagakerjaan, kemiskinan, IW, Indeks Gini);

Proyeksi nilai PDRB ADHK 2010 DIY untuk tahun 2016 sebesar 88.540.011 juta rupiah; tahun 2017: 93.937.625 juta rupiah; tahun 2018: 96.772.954 juta rupiah; tahun 2019: 100.897.346 juta rupiah; dan tahun 2020 senilai 105.021.737 juta rupiah.

Proyeksi laju pertumbuhan ekonomi DIY untuk tahun 2016 sebesar 4,3 persen; tahun 2017: 4,3 persen; tahun 2018: 4,2 persen; tahun 2019: 4,0 persen; dan tahun 2020 sebesar 3,8 persen.

Proyeksi inflasi DIY untuk tahun 2016 sebesar 5,03 persen; tahun 2017: 4,91 persen; tahun 2018: 4,79 persen; tahun 2019: 4,66 persen; dan tahun 2020 sebesar 3,54 persen.

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi

Proyeksi ICOR DIY untuk tahun 2016 sebesar 4,94; tahun 2017: 4,72; tahun 2018: 4,50; tahun 2019: 4,27; dan tahun 2020 sebesar 4,05.

Proyeksi jumlah orang Bekerja di DIY untuk tahun 2016 sebanyak 1.962.692 orang; tahun 2017: 1.978.098 orang; tahun 2018: 1.993.504 orang; tahun 2019: 2.008.910 orang ; dan tahun 2020 sebanyak 2.024.316 orang.

Proyeksi pengangguran terbuka di DIY untuk tahun 2016 sebanyak 40.644 orang; tahun 2017: 32.624 orang; tahun 2018: 24.605 orang; tahun 2019: 16.585 orang ; dan tahun 2020 sebanyak 8.566 orang.

Proyeksi Angkatan Kerja di DIY untuk tahun 2016 sebanyak 2.003.335 orang; tahun 2017: 2.010.722 orang; tahun 2018: 2.018.108 orang; tahun 2019: 2.025.495 orang ; dan tahun 2020 sebanyak 2.032.881 orang.

Proyeksi persentase penduduk miskin terhadap penduduk DIY untuk tahun 2016 sebesar 13,01 persen; tahun 2017: 12,42 persen; tahun 2018: 11,83 persen; tahun 2019: 11,25 persen ; dan tahun 2020 sebesar 10,66 persen.

Proyeksi IW DIY untuk tahun 2016 sebesar 0,4856; tahun 2017: 0,4902; tahun 2018: 0,4947; tahun 2019: 0,4993; dan tahun 2020 sebesar 0,5039.

Proyeksi IG DIY untuk tahun 2016 sebanyak 0,499; tahun 2017: 0,514; tahun 2018: 0,528; tahun 2019: 0,543; dan tahun 2020 sebanyak 0,557.

3. Perubahan asumsi ekonomi makro tahun lalu (2014/2015) dan perkiraan tahun berjalan (2015/2016).

Realisasi PDRB ADHK 2010 tahun 2014/2015 sebesar 79.532.277 juta rupiah dan pada tahun 2015 sebesar 83.461.574 juta rupiah. Peningkatan nilai PDRB disebabkan oleh gencarnya pemerintah daerah memperbaiki berbagai infrastruktur daerah. Pembangunan hotel terutama di wilayah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta juga memberi andil terhadap peningkatan nilai PDRB DIY.

Proyeksi laju pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2014/2015 sebesar 5,68 persen sedangkan realisasinya sebesar 5,2 persen. Sedangkan proyeksi laju pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2015/2016 sebesar 5,83 persen sedangkan realisasinya sebesar 4,9 persen. Nilai proyeksi dan realisasi laju pertumbuhan ekonomi DIY pada tahun 2014 maupun 2015 terjadi perbedaan masing-masing sebesar 0,48 dan 0,93 persen. Nilai realisasi laju pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2014 dan 2015 lebih rendah dari nilai proyeksi, perbedaan ini terjadi karena menurunnya konsumsi rumah tangga dan investasi yang dilakukan oleh investor akibat dari penurunan kondisi pasar.

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi

Proyeksi inflasi DIY tahun 2014/2015 sebesar 6,88 persen sedangkan realisasinya sebesar 6,59 persen. Sedangkan proyeksi inflasi DIY tahun 2015/2016 sebesar 7,45 persen sedangkan realisasinya sebesar 3,09 persen. Berdasarkan laporan BI, penurunan ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang secara serius mengendalikan inflasi di antaranya dengan menurunkan harga BBM pada 2015 dan faktor *base effect* akibat peningkatan harga BBM pada akhir tahun sebelumnya yang berdampak pada deflasi komponen *administered* dan ketersediaan beras secara nasional. Kebijakan yang dilakukan pemerintah di antaranya melalui kelonggaran impor serta gencarnya operasi pasar oleh Bulog. Hal itu di antaranya yang merupakan faktor yang menyebabkan penurunan inflasi *volatile food* pada akhir 2015.

Proyeksi ICOR DIY tahun 2014/2015 sebesar 4,62 sedangkan realisasinya sebesar 5,71. Sedangkan proyeksi ICOR DIY tahun 2015/2016 sebesar 4,15 sedangkan realisasinya sebesar 5,92.

Proyeksi jumlah orang Bekerja di DIY tahun 2014/2015 sebanyak 1.869.643 orang sedangkan realisasinya sebanyak 1.956.043 orang. Sedangkan proyeksi jumlah orang bekerja di DIY tahun 2015/2016 sebesar 1.881.271 orang sedangkan realisasinya data belum tersedia. Realisasi orang yang bekerja di DIY pada tahun 2014 lebih besar dibandingkan dengan proyeksinya, yaitu sebesar 86.400 orang. Realisasi penyerapan tenaga kerja meningkat pesat ini dapat terjadi dimungkinkan karena terjadinya peningkatan aktivitas pada sektor perdagangan besar dan ecerean, jasa lainnya dan sektor pertanian yang menunjukkan peningkatan dibandingkan sektor lainnya yang mengalami penurunan.

Proyeksi jumlah pengangguran terbuka di DIY tahun 2014/2015 sebanyak 84.285 orang sedangkan realisasinya sebanyak 67.418 orang. Sedangkan proyeksi jumlah orang bekerja di DIY tahun 2015/2016 sebesar 80.470 orang sedangkan realisasinya data belum tersedia. Realisasi pengangguran terbuka di DIY untuk tahun 2014 lebih kecil dibanding proyeksinya. Akan tetapi angka pengangguran di DIY tersebut masih cukup tinggi, sehingga diperlukan upaya lebih serius lagi untuk menekannya dengan meningkatkan keterampilan dan pendidikan SDM, yang sesuai dengan peluang kerja yang tersedia serta terus memperbesar kesempatan kerja di setiap sektor ekonomi yang ada.

Proyeksi jumlah angkatan kerja di DIY tahun 2014/2015 sebanyak 1.953.928 orang sedangkan realisasinya sebanyak 2.023.461 orang. Sedangkan

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi

proyeksi jumlah angkatan kerja di DIY tahun 2015/2016 sebesar 1.961.418 orang sedangkan realisasinya data belum tersedia. Tahun 2014 realisasi jumlah angkatan kerja di DIY mengalami kenaikan sebesar 69.533 orang dibandingkan proyeksinya. Ini dimungkinkan karena terjadinya penambahan penduduk usia kerja yang besar di atas yang diproyeksikan yang masuk ke angkatan kerja.

Proyeksi persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk DIY tahun 2014/2015 sebanyak 14,46 persen sedangkan realisasinya sebanyak 14,55 persen. Sedangkan proyeksi persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk DIY tahun 2015/2016 sebesar 13,84 persen sedangkan realisasinya sebesar 13,61 persen. Kemiskinan di DIY mengalami penurunan, tetapi tingkat kemiskinan di DIY terbilang masih tinggi.

Proyeksi IW DIY tahun 2014/2015 sebanyak 0,4610 sedangkan realisasinya sebanyak 0,4724. Sedangkan proyeksi IW DIY tahun 2015/2016 sebesar 0,4640 sedangkan realisasinya sebesar 0,4695. Realisasi IW tahun 2014 maupun 2015 masih lebih tinggi dibandingkan proyeksinya, meskipun demikian terjadi penurunan kesenjangan dari tahun 2014 yakni sebesar 0,4724 menjadi 0,4695 tahun 2015. Cukup tingginya nilai IW disebabkan oleh terjadinya ketidakseimbangan kinerja ekonomi antar kabupaten dan kota di-DIY.

Proyeksi IG DIY tahun 2014/2015 sebanyak 0,309 sedangkan realisasinya sebanyak 0,435. Sedangkan proyeksi IW DIY tahun 2015/2016 sebesar 0,307 sedangkan data realisasinya tidak tersedia. Realisasi IG sebesar 0,435 di tahun 2014 masih dalam kelompok ketimpangan rendah ($IG < 0,5$).

4. Skenario pencapaian target pertumbuhan ekonomi provinsi dan kabupaten/kota yang didasarkan pada RPJMD DIY 2012-2017.

- 4.1. Untuk Kabupaten Kulon Progo, pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 5,39 persen dan tahun 2017 sebesar 5,47 persen yang sesuai dengan target di RPJMD DIY tahun 2012-2017. Selama kurun waktu 2012-2017 lapangan usaha yang dominan mempengaruhi perekonomian Kabupaten Kulon Progo adalah: **(1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (2) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (3) industri pengolahan; dan (4) Konstruksi.**
- 4.2. Untuk Kabupaten Bantul, pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 6,15 persen dan tahun 2017 sebesar 6,20 persen yang sesuai dengan target di RPJMD DIY tahun 2012-2017. Selama kurun waktu 2012-2017

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi

lapangan usaha yang dominan mempengaruhi perekonomian Kabupaten Bantul adalah: **(1) Industri pengolahan; (2) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (3) penyediaan akomodasi dan makanan minuman (4)Kontruksi; dan (5) Informasi dan komunikasi.**

4.3. Untuk Kabupaten Gunung Kidul, pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 5,01 persen dan tahun 2017 sebesar 5,12 persen yang sesuai dengan target di RPJMD DIY tahun 2012-2017. Selama kurun waktu 2012-2017 lapangan usaha yang dominan mempengaruhi perekonomian Kabupaten Gunung Kidul adalah: **(1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (2) industri pengolahan; (3) kontruksi; (4) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan (5) Informasi dan Komunikasi.**

4.4. Untuk Kabupaten Sleman, pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 6,11 persen dan tahun 2017 sebesar 6,15 persen yang sesuai dengan target di RPJMD DIY tahun 2012-2017. Selama kurun waktu 2012-2017 lapangan usaha yang dominan mempengaruhi perekonomian Kabupaten Sleman adalah **(1) Industri Pengolahan; (2) Konstruksi; (3) Informasi dan Komunikasi (4) Jasa Pendidikan; dan (5) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.**

4.5. Untuk Kota Yogyakarta, pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 6,40 persen dan tahun 2017 sebesar 6,61 persen, yang sesuai dengan target di RPJMD DIY tahun 2012-2017. Selama kurun waktu 2012-2017 lapangan usaha yang dominan mempengaruhi perekonomian Kota Yogyakarta **(1) Informasi dan Komunikasi; (2) Industri Pengolahan; (3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; dan (4) Jasa Pendidikan.**

5. Perubahan Struktural Ekonomi di DIY

Mengacu pada PDRB atas harga konstan 2010, perkembangan tiap lapangan usaha primer, sekunder dan tersier dapat dijelaskan bahwa sektor tersier merupakan sektor dominan di DIY. Perkembangan sektor tersier dari tahun 2010 sampai 2015 selalu di atas 50 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor tersier menyumbang lebih dari setengah PDRB DIY

6. Kondisi Perekonomian Global 2014-2015

Kondisi perekonomian global dalam perekonomian sekarang ini sangat mempengaruhi perekonomian suatu negara. Kondisi pasar global saat ini belum sepenuhnya kembali kepada kondisi terbaiknya yang ditunjukkan oleh kondisi pasar yang masih melemah, sehingga hal ini mempengaruhi juga kinerja perekonomian Indonesia dan

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi

DIY yang meskipun masih mengalami pertumbuhan tetapi angka pertumbuhannya cenderung mengecil (menurun).

7. Implementasi MEA 2015

MEA yang mulai diberlakukan akhir tahun 2015 telah terasa dampaknya pada perekonomian di negara ASEAN dengan terjadinya mobilitas tenaga kerja antar negara. Implementasi MEA dimaksudkan untuk membentuk negara-negara yang tergabung dalam ASEAN menjadi kekuatan ekonomi global baru melalui pasar tunggal dengan aliran bebas barang, modal, jasa, investasi, dan tenaga kerja terampil. Kawasan regional ASEAN juga diarahkan untuk membentuk kawasan yang berbasis produksi, berdaya saing tinggi, dan pembangunan merata yang terintegrasi dengan ekonomi global.

5.2. Rekomendasi

Dari kesimpulan di atas, maka kajian ini memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Pengendalian Tingkat Inflasi dan Peningkatan Daya Beli Masyarakat.

Pengendalian inflasi di DIY perlu terus dilakukan oleh pemerintah, baik melalui kebijakan fiskal ataupun moneter. Melalui pengendalian inflasi tersebut pemerintah akan membantu masyarakat dalam menjaga daya belinya. Konsumsi masyarakat terbukti dapat menjadi salah satu faktor penting bagi peningkatan PDRB DIY dan pertumbuhan ekonomi DIY. Jika pemerintah berhasil mengoptimalkan daya beli masyarakat dan menjadikan pasar domestik sebagai jaring pengaman di dalam menyerap produk-produk khususnya hasil UMKM yang banyak tersebar di DIY maka hal itu akan dapat menjaga kontinuitas usaha dan perkembangan UMKM di DIY. Jika pertumbuhan ekonomi terus dapat terjadi di DIY maka perkembangan usaha akan dapat terus tercipta yang akan menjadi salah satu solusi bagi persoalan penyerapan tenaga kerja, pengurangan tingkat pengangguran, peningkatan pendapatan masyarakat serta pengurangan tingkat kemiskinan secara signifikan.

2. Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha yang Kondusif

Pemda DIY harus terus meningkatkan pelayanan dan iklim Investasi di DIY untuk bisa memenangkan persaingan dengan daerah-daerah lain baik di Indonesia atau di luar negeri, karena investasi menjadi salah satu faktor penting di dalam meningkatkan kegiatan ekonomi kabupaten/kota di DIY khususnya meningkatkan kapasitas industri domestik. Di samping nilai investasi yang diharapkan terus naik yang juga perlu diperhatikan adalah pemerataan investasinya yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi

kabupaten/Kota tersebut. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi kesenjangan antara kabupaten/kota di DIY yang belakangan ini semakin meningkat.

Pemda DIY juga harus dapat meningkatkan iklim usaha semakin kondusif bagi perkembangan usaha yang lebih sehat, dan kompetitif. Melalui strategi ini didukung pengurangan ekonomi biaya tinggi melalui program reformasi komprehensif di bidang perpajakan, kepastian dan birokrasi diharapkan perkembangan usaha di DIY dapat semakin berkembang, didukung oleh penguatan produk-produk unggulan daerah (kabupaten/kota) yang semakin menarik, inovatif dan berdaya saing tinggi.

3. Menyiapkan SDM dan Produk Berkualitas di Era MEA

Era MEA sudah berjalan, semua sumberdaya yang dimiliki negara dan daerah harus diupayakan ditingkatkan agar dapat memenangkan persaingan yang semakin terbuka. Pemda DIY harus sudah bergerak didalam menyiapkan SDM-nya melalui pemberdayaan SDM yang dapat dilakukan melalui penetapan kebijakan-kebijakan yang terkait dan didukung penuh dalam APBD yang dapat menghasilkan keputusan-keputusan terkait dengan pengembangan SDM, serta kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya.

Peningkatan SDM tersebut pada prinsipnya untuk meningkatkan daya saing SDM baik kualitas pendidikan, keterampilan dan penguasaan teknologi yang diperlukan dalam dunia kerja yang bertujuan di samping menguasai pasar tenaga kerja Indonesia juga dapat mengisi kebutuhan SDM di beberapa negara ASEAN.

Produk ekspor DIY yang dihasilkan oleh usaha skala menengah, kecil dan usaha pada umumnya juga harus terus ditingkatkan kualitasnya dan harga produknya dapat menjadi lebih kompetitif untuk dapat memenangkan persaingan di Intra ASEAN. Persaingan antar negara ASEAN di pasar ekspor juga cukup ketat karena adanya kesamaan produk yang dihasilkan. Strategi peningkatan nilai tambah dan inovasi bagi produk ekspor DIY perlu terus diupayakan sehingga produk ekspor DIY mempunyai karakteristik tersendiri berbeda dengan produk-produk ekspor dari Negara-negara ASEAN lainnya, sehingga dapat memenangkan persaingan, baik di pasar ASEAN ataupun di pasar global.

4. Membangun Sinergi Sektor Swasta dan Pemerintah

Kegiatan pembangunan ekonomi di DIY membutuhkan dana, daya serta pemikiran yang besar. Kondisi tersebut hanya akan dapat berjalan dengan baik bilamana terjadi sinergi hubungan kemitraan yang kuat antara sektor swasta dan pemerintah. Potensi-

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi

potensi besar yang dimiliki DIY tersebut akan optimal bila dapat didayagunakan melalui peran serta dan kerjasama yang baik antara sektor swasta dan pemerintah. Penguatan hubungan kemitraan antara swasta dan pemerintah yang bersinergi akan efektif bilamana ada kesamaan visi antar *stakeholders* DIY dalam mendorong kegiatan ekonomi DIY menjadi lebih baik lagi.

5. Penguatan sektor ekonomi Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota di DIY memiliki sektor dominan bagi perkembangan ekonomi di daerahnya. Pemerintah daerah di Kabupaten/Kota dapat mendorong sektor-sektor dominan dalam ekonominya untuk bergerak lebih cepat dari sebelumnya agar pertumbuhan ekonomi daerahnya bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Jika sektor dominan ekonomi daerah dapat diakselerasi pertumbuhannya maka PDRB kabupaten/kota akan dapat meningkat lebih baik yang tentunya akan bermanfaat lebih baik lagi bagi perekonomian kabupaten/kota dan DIY.